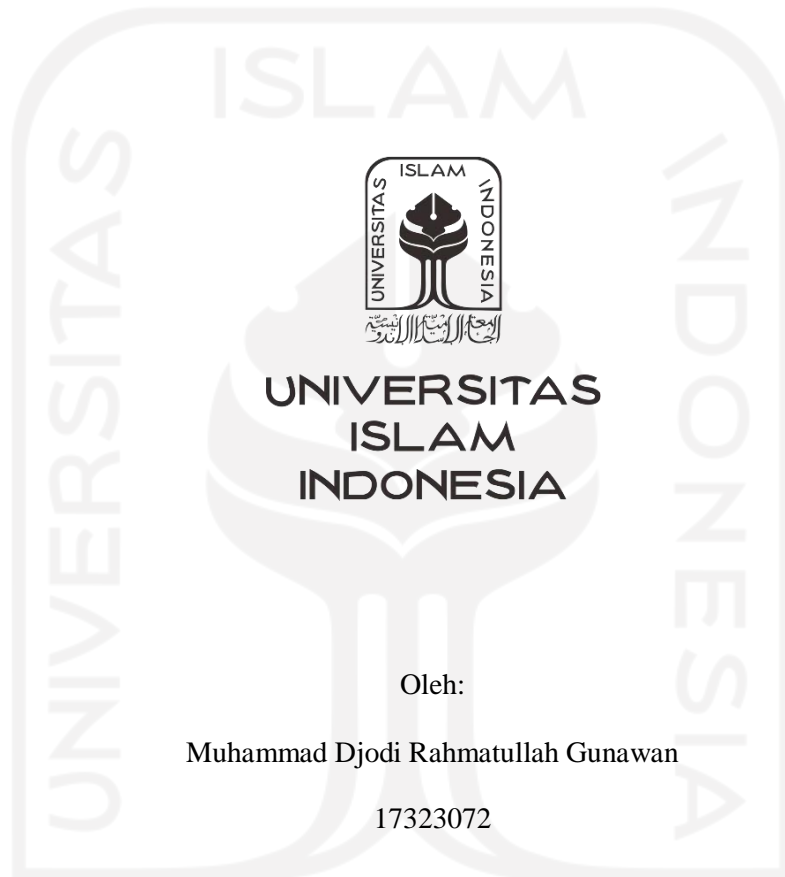


**EKSPANSI PASAR EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA DAN
RESPONS TERHADAP EMBARGO EKONOMI UNI EROPA TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Djodi Rahmatullah Gunawan

17323072

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

**EKSPANSI PASAR EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA DAN
RESPONS TERHADAP EMBARGO EKONOMI UNI EROPA TAHUN**

2018-2020

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

HALAMAN JUDUL

Oleh:

Muhammad Djodi Rahmatullah Gunawan

17323072

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

EKSPANSI PASAR EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA DAN RESPONS TERHADAP EMBARGO EKONOMI UNI EROPA TAHUN 2018-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

20 Agustus 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana., S.I.P., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Hangga Fathana., S.I.P., B.Int.St., M.A.

2 Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.

3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

20 Agustus 2021,



Muhammad Djodi Rahmatullah Gunawan

Tanda tangan dan nama lengkap mahasiswa

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Tulisan penelitian ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu

Terima kasih atas segala semangat, nasehat, dukungan, pengorbanan, dan doa yang tak terhingga, yang telah kalian hibahkan selama ini.

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, nasehat yang telah diberikan selama ini.

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2017

Terima kasih atas segala kebersamaan, dukungan, perjuangan bersama

selama menempuh kuliah di HI UII.

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik daripada pengetahuan dan kesabaran.”

(Nabi Muhammad SAW)



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah subhanallahu wa ta'allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dengan sepenuh hati.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kekuatan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada bagi penulis
2. Kepada keluarga saya di rumah, yaitu Nenek, Ayah, Ibu, dan adik-adik saya. Mereka yang selalu memberikan dukungan penuh untuk saya. Mereka tanpa henti mengatakan jika saya harus lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka selalu memberikan kasih sayang, cintanya untuk saya, dan mempercayai saya untuk belajar dan berproses di kuliah di Universitas Islam Indonesia ini untuk bisa mencari lingkungan yang baik pastinya. Terima kasih untuk setiap pengorbanan dan keringat yang kalian berikan. Semoga ayah, ibu, dan kakak selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT.
3. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D.
4. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar untuk mendidik saya hingga proses penyelesaian skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga segala hal telah bapak ajarkan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik

untuk agama dan orang-orang di sekitar. Semoga Allah memberikan keselamatan dan nikmat yang terbaik untuk bapak beserta keluarga.

6. Seluruh dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk ilmu dan pelajaran yang telah diberikan.
7. Teruntuk Sahabat saya di Berau, Albar, Ilham, Figur, Abang Ardi, dan Abang Udin. Terima kasih banyak sudah memberikan saya cerita dan kenang-kenangan yang inshaallah tidak akan terlupakan hingga saya tua nanti.
8. Teruntuk Fitaria, tetaplah menjadi wanita yang kuat, wanita yang tegar, dan wanita yang senantiasa berbahagia. Permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada anda atas kesalahan yang mungkin saya lakukan. Saya hanya bisa berharap untuk kebaikan selalu menyertai anda dimasa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak atas sedikit cerita dan banyaknya pelajaran yang telah saya petik selama saya mengenal anda. Percayalah, anda telah mengubah bagaimana saya melihat dunia, dan percayalah inshaallah tidak akan ada luka yang tidak akan sembuh seiring berjalannya waktu. Terakhir, semoga menjadi pribadi yang selalu baik dan tetaplah menjadi Fitaria yang selalu ceria.
9. Kepada sahabat beserta pengurus Kost Arjuna 9 Alam, Ikhwan, Daffa, Fahbil, Hamdi, Dhandy, beserta Mas Hakim, Mas Hari, Bunda Bella, dan Bapak Jenny Dwi. Terima kasih banyak atas kisah dan cerita yang telah saya alami di rumah kedua saya ini. Tempat dimana sebagian dari saya yang tidak bisa pulang lagi ke tanah Kalimantan. Doa yang terbaik selalu menyertai.
10. Teruntuk Sahabat-sahabat di Jogjakarta yang telah menemani saya mulai dari hari pendaftaran masuk kampus hingga hari sidang akhir skripsi saya Niko, Yoma, Rayhan, Rana, Deni, Aditya, beserta teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas memori yang tidak ternilai harganya. Doa yang terbaik selalu menyertai.
11. Teruntuk teman-teman motoran saya yang mengenalkan saya kepada indahnya dunia Jogjakarta Fahbil, Alam, Azka, Panji, Bang Nova, Bang

Afif, Bang Kiky, Luthfi, Ryo, Rayhan, Rafi. Terima kasih banyak atas kenangan yang tidak bisa saya lupakan.

12. Semua pihak yang terlibat membantu penulis, dalam bentuk doa maupun materi, nasehat, serta dukungan berupa moral kepada penulis.



ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia memiliki pasar ekspor yang menjanjikan seperti Uni Eropa, India, dan Tiongkok. Namun dengan diberlakukannya kebijakan *Renewable Energy Directive II* atau RED II yang bertujuan untuk meningkatkan standar emisi gas buang kemudian berdampak kepada kegiatan ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke Uni Eropa. Maka dari itu Pemerintah Indonesia kemudian merespons dengan kebijakan untuk memperluas dan memanfaatkan pasar-pasar minyak kelapa sawit Indonesia non-Uni Eropa. Penelitian ini akan menjabarkan mengenai faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi arah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu embargo minyak kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa ini.

Kata Kunci : Indonesia, Uni Eropa, Geopolitik, Kebijakan, RED II, Embargo, Minyak kelapa sawit.

ABSTRACT

Indonesia as one of the largest palm oil producing countries in the world has promising export markets such as the European Union, India and China. However, with the enactment of the Renewable Energy Directive II or RED II policy which aims to improve exhaust emission standards, then it has an impact on palm oil export activities from Indonesia to the European Union. Therefore, the Government of Indonesia then responded with a policy to expand and exploit the non-EU Indonesian palm oil markets. This study will describe what factors will influence the direction of the Indonesian government's policy in dealing with the issue of the European Union's embargo on Indonesian palm oil.

Keywords : *Indonesia, European Union, Geopolitics, Policy, RED II, Embargo, Palm oil.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Signifikansi Penelitian	4
1.5. Cakupan Penelitian	4
1.6. Tinjauan Pustaka.....	5
1.7. Landasan Konsep/Teori/Model	7
1.8. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Subjek dan Objek Penelitian	9
3. Metode Pengumpulan Data	10
4. Proses Pengumpulan Data.....	10
BAB II PERDAGANGAN INDONESIA DAN UNI EROPA	11
2.1. Hubungan Perdagangan Uni Eropa dan Indonesia	11
2.2. Komoditas Unggulan Uni Eropa dan Indonesia	14
2.3. Hubungan Ekspor CPO Indonesia dan Uni Eropa.....	16
2.4. Pemberlakuan kebijakan RED II oleh Uni Eropa dan Respons Domestik Indonesia	20
BAB III APLIKASI TEORI <i>DECISION MAKING</i>.....	23
3.1. Politik Domestik.....	23
3.1.1 Kepentingan yang Mempengaruhi	24
3.1.2. Birokrat yang mempengaruhi.....	32
3.1.3. Partai yang Mempengaruhi	33
3.1.4. Massa yang Mempengaruhi	35
3.2. Faktor Ekonomi dan Militer	36
3.2.1. Kapasitas Pengolahan Barang dan Jasa	39

3.2.2. Posisi Kelapa Sawit di Perdagangan Luar Negeri Indonesia serta Perannya Dalam Perekonomian Domestik	46
3.2.3. Kerja sama Militer Indonesia dan Uni Eropa.....	47
3.3. Konteks Internasional	49
3.3.1. Faktor Geografis	50
3.3.2. Faktor Ekonomi	54
3.3.3. Faktor Politik.....	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Negara Anggota Uni Eropa Tahun 2019	13
Tabel 2.2 Data ekspor dan impor komoditas MIGAS dan non-MIGAS Indonesia dan Belanda	15
Tabel 2.3. Data total berat bersih ekspor minyak kelapa sawit ke Negara-negara anggota Uni Eropa	21
Tabel 2.4. Nilai <i>Free on Board</i> (FOB) dari aktivitas impor kelapa sawit Indonesia ke Belanda, Spanyol, dan Italia	21
Tabel 3.1. Ekspor minyak sawit Indonesia ke India dan Tiongkok	32
Tabel 3.2. Ekspor minyak sawit Indonesia ke India, Pakistan, dan Bangladesh	35
Tabel 3.3. Komoditas Ekspor non-migas Indonesia (USD Juta)	48
Tabel 3.4. Negara-negara produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia	58
Tabel 3.5. Negara-negara pengimpor minyak kelapa sawit terbesar dunia	59
Tabel 4.1. Variabel Teori Decision Making dan Aplikasinya Terhadap Studi Kasus Embargo CPO Indonesia	65

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Teori <i>Decision Making Process</i> oleh WilliamD. Coplin	9
Grafik 3.1.	Peran Massa dalam Mempengaruhi Kebijakan Pembuat Keputusan.....	37
Grafik 3.2.	Teori Ekonomi dan Militer Sebagai Instrumen Politik Luar Negeri.....	40
Grafik 3.3.	Faktor-Faktor Dari Konteks Internasional	51
Grafik 3.4.	Kerjasama Geografis Antara Negara-Negara Uni Eropa serta Kerjasama Geografis Indonesia dan Malaysia dalam Merespons RED II.....	55
Grafik 3.5.	Kebijakan RED II yang Mempengaruhi Uni Eropa dan Indonesia	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang mempunyai komoditas dagang yang berlimpah. Daratan dan lautan yang terbentang di negeri ini seakan-akan tidak ada habisnya memberikan manfaatnya kepada rakyat Indonesia dan dunia. Tidak hanya hasil bumi berupa hasil tambang maupun pertanian, salah satu komoditas ekspor Indonesia yang sangat digemari oleh pasar dunia adalah *Crude Palm Oil* atau minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan bahan mentah yang dapat diolah menjadi beberapa produk lainnya, seperti mentega, sabun serta shampo, make up kecantikan, dan sabun cuci pakaian. Tetapi hasil akhir olahan minyak kelapa sawit yang paling populer adalah menjadi *biodiesel* atau bahan bakar diesel yang terbarukan. Tentunya bahan bakar diesel adalah salah satu bagian penting sebagai penunjang berjalannya perekonomian industri di negara-negara dunia.

Hasil kelapa sawit Indonesia juga merupakan salah satu yang terbesar di dunia yang saat ini produksinya masih bersaing ketat dengan negara tetangga kita Malaysia. Tercatat pada tahun 2018 ekspor minyak kelapa sawit mentah Indonesia ke negara Uni Eropa seperti Belanda mencapai 0,62 juta ton yang mana 60%, serta dari kegiatan ekspor tersebut Uni Eropa telah menyumbangkan sebanyak 14% dalam total keseluruhan ekspor minyak kelapa sawit mentah ke pasar dunia. Namun pada saat ini India menjadi importir terbanyak dari produksi minyak kelapa sawit Indonesia (Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2019).

Dengan luas wilayah penanaman minyak kelapa sawit yang terus meluas dari 14,33 juta hektar pada tahun 2018 menjadikan potensi penyerapan tenaga kerja yang besar. Tercatat pada tahun yang sama industri ini menyerap sebanyak 16,2 juta tenaga kerja, dengan terbagi atas 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung (Anggraeni, 2018). Dibawah oleh tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 18,25 juta tenaga kerja (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2019).

Namun Uni Eropa akan membuat sebuah regulasi untuk mengurangi impor dari minyak kelapa sawit Indonesia yang dimulai pada tahun 2024 dan tidak lagi menggunakan kendaraan yang dioperasikan dengan bahan bakar diesel maupun yang bermesin bensin pada tahun 2030. Hal ini tentunya membuat Pemerintah dan produsen minyak kelapa sawit Indonesia harus melakukan sesuatu untuk tetap dapat memanfaatkan volume dari komoditas minyak kelapa sawit yang terus bertambah namun akibat adanya pengurangan ekspor ini bisa menimbulkan kerugian bagi produsen dan juga Pemerintah.

Ekspansi pasar ekspor minyak kelapa sawit yang dilakukan Pemerintah Indonesia ini dalam tujuan untuk memfokuskan pasar yang ada dengan mengalihkan stok volume ekspor Indonesia yang tidak terkirim akibat adanya embargo dari Eropa ini. Dengan melihat pasar-pasar yang sudah ada seperti Tiongkok misalnya yang mengalami kenaikan volume impor dan pangsa pasar minyak kelapa sawit dari Indonesia pada tahun 2019 (Yuniarto, 2019).

Maka dari itu Indonesia sedang memfokuskan perhatian mereka kepada negara-negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yang bukan lagi

berada di Eropa. Mengingat dengan adanya embargo ini, Pemerintah menilai dengan adanya kebijakan pengurangan impor ini tidak lagi akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi Indonesia. Adanya negara-negara seperti India dan Tiongkok menjadi peluang besar Indonesia dalam tujuan mereka untuk mengalihkan volume ekspor mereka yang sempat berkurang.

Seperti yang kita ketahui bahwa, adanya embargo minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa ini menimbulkan masalah serius bagi Pemerintah dan Produsen CPO Indonesia. Mengingat Pemerintah mulai menghambat masuknya produk dari Eropa, menandakan Indonesia serius dalam keberatan mereka untuk CPO Indonesia yang menurut Uni Eropa pengolahannya dinilai tidak ramah lingkungan serta dengan kemungkinan melakukan embargo secara penuh untuk komoditas CPO Indonesia. Maka dari itu permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah hal-hal yang mempengaruhi pertimbangan Pemerintah Indonesia untuk mencari pasar non-Uni Eropa untuk memasarkan minyak kelapa sawitnya. Dengan menganalisis faktor domestik dan internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia memutuskan untuk mencari pasar baru di sektor ekspor kelapa sawit setelah terbitnya kebijakan pengurangan impor oleh Uni Eropa?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis strategi diplomasi perdagangan Indonesia di sektor kelapa sawit setelah kebijakan pengurangan impor oleh Uni Eropa;

2. Mengidentifikasi respons dari Pemerintah Indonesia mengenai kebijakan untuk memetakan hubungan dagang antara Uni Eropa dan Indonesia setelah timbulnya isu ini;
3. Memetakan potensi pasar alternatif minyak kelapa sawit Indonesia.

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini melihat upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan Uni Eropa yang dinilai merugikan Produsen Minyak Kelapa Sawit dan juga Pemerintah Indonesia. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan tersebut dalam upaya untuk menekan produksi Kelapa Sawit yang dinilai tidak ramah lingkungan. Serta salah satu hasil akhir dari Minyak Kelapa Sawit ini yaitu bahan bakar bio solar dinilai tidak memenuhi standar emisi gas buang yang semakin diperketat oleh Uni Eropa. Penelitian ini juga melihat upaya Indonesia dalam melihat pasar-pasar baru yang dinilai bisa menguntungkan Indonesia kedepannya.

1.5. Cakupan Penelitian

Penelitian ini mencakup rentang waktu dikeluarkannya kebijakan Uni Eropa yang melarang impor minyak kelapa sawit dari Indonesia pada tahun 2018 hingga 2020. Dalam kurun waktu tersebut penelitian ini akan memaparkan apa saja yang menjadi dampak dari pengurangan Impor Minyak Kelapa Sawit oleh Uni Eropa dalam upaya mereka untuk memperketat standar emisi gas buang kendaraan dan juga penegakan isu lingkungan yang dalam hal ini dinilai masih rendah pada proses penanaman hingga pengolahan Minyak Kelapa Sawit ini. Pada tahun 2018 hingga 2020 penelitian ini juga melihat adanya penurunan tingkat ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa yang disebabkan penurunan minat beli.

Serta diikuti dengan kenaikan volume ekspor ke salah satu pasar lain yaitu Tiongkok.

1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian politik perdagangan sektor kelapa sawit, terdapat sejumlah riset yang sebelumnya telah dilaksanakan dan memiliki kontribusi penting untuk memetakan posisi riset ini. Jhon Hardy membahas industri minyak kelapa sawit merupakan prospek agrobisnis yang cukup menjanjikan. Melihat bagaimana produk dari tanaman kelapa sawit ini tidak hanya mengandalkan minyaknya saja, melainkan bagian tubuh dari tanaman ini sendiri juga dapat menjadi komoditas yang cukup bernilai apabila dapat diolah dengan baik. Hardy juga menguraikan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor minyak kelapa sawit di wilayah Asia Tenggara mempunyai pasar yang konsisten dari tahun 2002 hingga tahun 2009. Negara-negara yang menjalin hubungan dagang minyak kelapa sawit pada rentang waktu itu adalah Uni Eropa, India, dan China. Namun pada tahun 2008 Uni Eropa menjadi pasar terbesar dalam kegiatan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia (Hardy, 2015, hal. 100).

Dari segi isu keberlangsungan lingkungan Kartika membahas tentang bagaimana Uni Eropa mulai membuat beberapa regulasi yang menaungi standar lingkungan dalam berbagai industri. Kebijakan yang bersinggungan langsung dengan aktivitas impor minyak kelapa sawit dari Indonesia adalah kebijakan RED (*Renewable Energy Directive*). Kebijakan ini mengatur negara-negara Uni Eropa dalam mengurangi emisi gas rumah kaca mereka sekurang-kurangnya sebanyak 20%. Uni Eropa menggunakan kebijakan tersebut sebagai standar untuk dapat mengurangi pembelian minyak kelapa sawit dari Indonesia. Karena minyak

kelapa sawit mempunyai senyawa yang dinilai gagal memenuhi target yang ditetapkan oleh Uni Eropa yaitu sebesar 35%. Ketentuan tersebut tercantum dalam kebijakan RED artikel 17 ayat 2 yang berbunyi; *“The greenhouse gas emission saving from the use of biofuels and bioliquids taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 shall be at least 35 %”* (Kartika, 2016, hal. 5).

Sebagai salah satu komoditas ekspor besar Indonesia, Malian membahas tentang bagaimana ekspor CPO Indonesia memiliki kedudukan yang cukup tinggi dipasar dunia yang bersaing dengan Malaysia. Ekspor CPO Indonesia sebagian besar didominasi oleh minyak kelapa sawit dan minyak biji kelapa sawit. Negara-negara tujuan utama bagi komoditas ini pada saat itu adalah ke Belanda, Jerman, Italia, India dan China. Dalam tahun 1995 nilai ekspor CPO Indonesia telah mencapai US \$ 590,5 juta, dan meningkat menjadi US \$ 892,0 juta pada tahun 2002 (Malian, 2004, hal. 149).

Untuk merespons kebijakan Uni Eropa dalam mengurangi impor Minyak Kelapa Sawit dari Indonesia, Merrysa membahas tentang apa strategi dan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekspor kelapa sawit. Diantara langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yang salah satunya adalah visi-visi yang dibuat oleh Kementerian Pertanian RI. Visi-visi tersebut mempunyai kegunaan untuk dapat meningkatkan kualitas serta standar mutu dari komoditas itu. Sehingga keberadaan Kementerian Pertanian dapat memastikan hal tersebut layak atau tidak layak untuk diproduksi (Merrysa, 2018, hal. 65)

Hardiwijaya membahas tentang bagaimana terdapat adanya *black campaign* dari kegiatan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke Uni Eropa yang dapat mengganggu proses pembelian dari salah satu komoditas utama dari Indonesia pada saat itu (Hadiwijaya, 2018, hal. 18)

1.7. Landasan Konsep/Teori/Model

Untuk membantu menjawab rumusan masalah, dibutuhkan sebuah landasan konsep yang memadai. Maka dari itu landasan teori atau model teori yang saya ambil adalah *Decision Making theory* yang dicetuskan oleh William D. Coplin. Teori *Decision Making* ini menurut Coplin bahwa keputusan dari suatu negara adalah sebuah cerminan dari kepentingan negara itu sendiri.

Adapun nilai-nilai yang terkandung didalam teori ini adalah negara sebagai pembuat kebijakan (*decision makers*) (Coplin, 1992). Coplin berpendapat ada tiga buah faktor yang menjadi pertimbangan bagi para *decision makers* dalam menentukan suatu kebijakan luar negeri yaitu;

1. Keadaan politik domestik dari suatu negara, Coplin berpendapat bahwa keadaan suatu Negara merupakan sebuah faktor penting dalam memutuskan sebuah kebijakan luar negeri. Keadaan yang dimaksud ini adalah sebuah hubungan timbal balik yang terjadi antara Pembuat Kebijakan dan para *Influencer* atau aktor berkepentingan. Aktor berkepentingan ini terbagi atas empat yaitu Birokrat yang mempengaruhi, Partai yang mempengaruhi, Kepentingan yang mempengaruhi, dan Massa yang mempengaruhi. Hubungan timbal balik ini bekerja dengan cara *Influencer* akan menyuarakan kepentingan mereka kepada Pembuat Kebijakan dengan harapan akan dijadikan sebuah kebijakan yang dapat menguntungkan

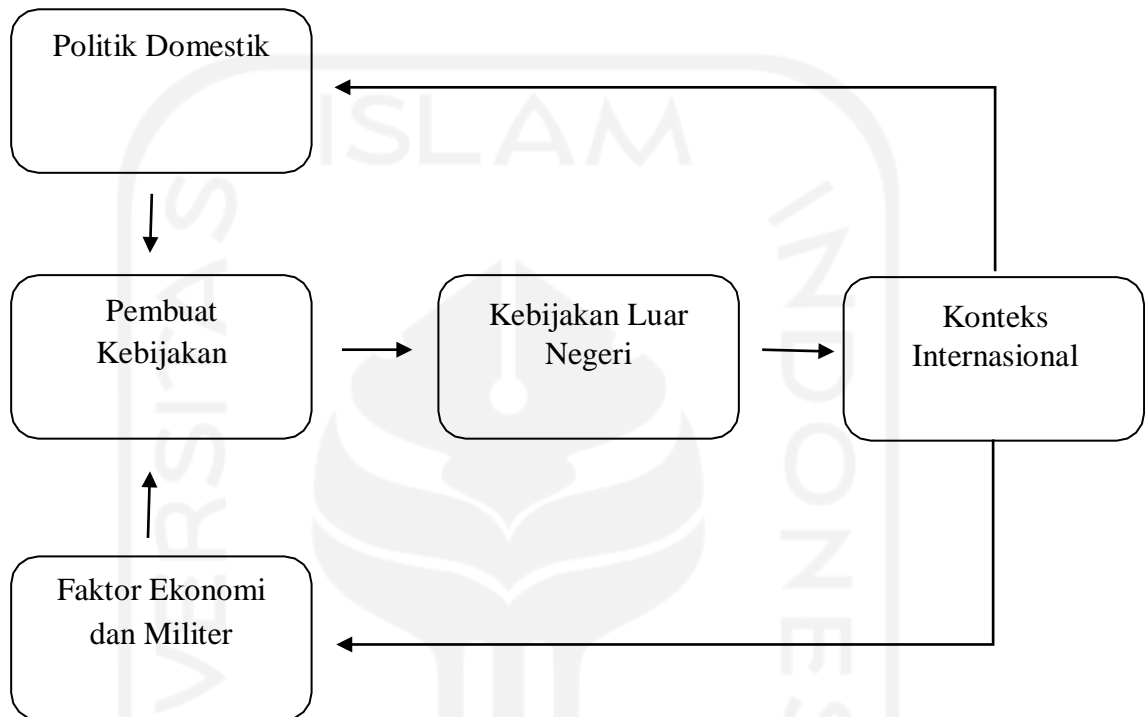
mereka. Sedangkan kegunaan aktor berkepentingan kepada Pembuat Kebijakan adalah ketika sebuah kebijakan telah dibuat dan mendapatkan respons baik dari para *Influencer* maka Negara tersebut dinilai telah berhasil (Coplin, 1992, hal. 75).

2. Perekonomian dan militer, adalah dua hal yang beriringan dalam tujuan untuk memperlihatkan kekuatan serta alat untuk memperkuat kebijakan luar negeri dari suatu negara. Dari segi Ekonomi, kapasitas produksi barang dan jasa memegang peranan penting. Untuk mengetahui menghitung besar kapasitas produksi dari suatu negara dilakukan dengan cara mendata *Gross National Product* atau GNP. Dengan GNP ini para ahli ekonomi dapat mengukur nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Serta GNP juga bisa digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mengukur kemakmuran dari penduduk suatu negara dan membandingkannya dengan negara lain. Sementara itu dari segi militer sebuah negara dapat terlihat bagus apabila mempunyai keterampilan yang tinggi namun dengan menggunakan peralatan perang yang biasa saja dan begitu pula sebaliknya (Coplin, 1992, hal. 115-125).
3. Konteks internasional, Coplin berpendapat ada tiga buah elemen penting dari konteks internasional yang bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri dari suatu negara yaitu geografis, ekonomi, dan politis (Coplin, 1992, hal. 167). Namun dalam penelitian ini akan lebih difokuskan kepada faktor ekonomi dan politik.

Teori tersebut akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana responss yang akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap embargo produk olahan minyak kelapa sawit dari Indonesia dengan melihat dari segi politik domestik, perekonomian dan militer, serta konteks internasional. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis bagaimana aktor berkepentingan domestik

Indonesia mendesak Pemerintah untuk bisa mencari pasar baru untuk komoditas CPO serta konteks internasional yaitu Embargo olahan minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Grafik 1.1 : Teori *Decision Making Process* oleh William D. Coplin



1.8. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia (yang dalam konteks ini adalah para pengambil keputusan) dalam situasi tertentu. (Gunawan)

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam tulisan ini adalah para pengambil keputusan atau para *decision maker*, serta kebijakan yang akan mereka ambil untuk menghadapi embargo ekonomi dari Uni Eropa ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah metode pengumpulan data yang bersifat dokumentasi. Menggunakan jenis data sekunder, metode ini memungkinkan saya untuk dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, berita, dan laporan.

4. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini saya ambil dari berbagai macam tulisan seperti artikel, berita maupun jurnal yang tersebar di internet. Setelah membaca dan memilah kemudian poin-poin tersebut saya cantumkan ditulisan saya beserta sumber artikel atau karya tulis tersebut.

BAB II

PERDAGANGAN INDONESIA DAN UNI EROPA

2.1. Hubungan Perdagangan Uni Eropa dan Indonesia

Berbagai macam sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tentunya menjadi daya tarik tersendiri yang juga telah menempatkan Indonesia menjadi salah satu pasar komoditas yang diminati di kalangan negara-negara lainnya. Uni Eropa telah melihat peluang yang dimiliki Indonesia untuk dijadikan mitra dalam hubungan dagangnya. Mulai dari kegiatan impor dan ekspor komoditas bahan mentah, produk hasil akhir, hingga pengiriman tenaga kerja ahli.

Indonesia juga berupaya untuk memperlancar arus perdagangan dengan Uni Eropa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 111 tahun 2018 tentang ketentuan dan tata cara pembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB) atau *origin declaration* untuk barang impor asal Indonesia. Dalam hal ini DAB dapat digunakan oleh para produsen untuk bisa mendapatkan fasilitas pengurangan atau bahkan pembebasan dari biaya tarif bea masuk. Selain itu Uni Eropa juga menyambut baik upaya Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perundingan perjanjian dalam bidang kemitraan ekonomi komprehensif yaitu IEU-CEPA (Kementerian Perdagangan, 2019).

Table 2.1. Neraca Perdagangan Indonesia dengan Negara Anggota Uni Eropa Tahun 2019

Negara Mitra	Ekspor	Impor	Neraca (+/-)
Belanda	3,204,951.0	832,012.1	+2,372,938.9
Jerman	2,405,755.1	3,476,535.2	-1,070,780.1
Belgia	1,075,680.7	633,561.0	+442,119.7
Perancis	1,013,250.1	1,424,313.2	-411,063.2
Italia	1,749,309.1	1,776,576.3	-27,267.2

Sumber: (Portal Statistik Perdagangan, 2021).

Pada tahun 2019 Indonesia dan Belanda tercatat mendapatkan hasil ekspor dengan total 3,204,951.0 Dollar Amerika Serikat. Nilai ekspor ini terdiri dari komoditas MIGAS sebanyak 147,664.3 Dolar Amerika Serikat dan sektor non-MIGAS sebanyak 3,057,286.7 Dollar Amerika Serikat. Pada sektor impor tercatat sebanyak 832,012.1 Dollar Amerika Serikat, dengan rincian dari komoditas-MIGAS sebanyak 1,402.5 ribu Dollar Amerika Serikat dan sektor non-MIGAS sebanyak 830,609.6 Dollar Amerika Serikat. Maka dari itu pada tahun 2019 Indonesia tercatat mengalami surplus sebanyak +2,372,938.9 Dollar Amerika Serikat.

Indonesia dan Jerman tercatat melakukan kegiatan dagang dengan nilai total ekspor sebanyak 2,405,755.1 Dollar Amerika Serikat dengan rincian sektor MIGAS sebanyak 263.5 ribu Dollar Amerika Serikat dan non-MIGAS sebanyak 2,405,491.6 Dollar Amerika Serikat. Total nilai impor sebanyak 3,476,535.2 Dollar Amerika Serikat dengan komoditas MIGAS sebanyak 11,109.5 Dollar Amerika Serikat dan sektor non-MIGAS sebanyak 3,465,425.7. Berbeda dengan Belanda, Indonesia kali ini mengalami defisit perdagangan dengan Jerman sebanyak -1,070,780.1 Dollar Amerika Serikat.

Perdagangan Indonesia dan Belgia tercatat dengan nilai ekspor sebanyak 1,075,680.7 Dollar Amerika Serikat yang terbagi atas sektor MIGAS sebanyak 217.9 ribu Dollar Amerika Serikat dan sektor non-MIGAS sebanyak 1,075,462.8 Dollar Amerika Serikat. Kemudian nilai impor tercatat pada 633,561.0 Dollar Amerika Serikat yang terbagi atas sektor MIGAS sebanyak 89,455.0 dan sektor non-MIGAS sebanyak 544,106.0 Dollar Amerika Serikat. Maka dari itu tercatat perdagangan Indonesia dan Belgia pada tahun 2019 ini mengalami surplus sebanyak +442,119.7 Dollar Amerika Serikat.

Indonesia dan Perancis tercatat melakukan ekspor sebanyak 1,013,250.1 Dollar Amerika Serikat yang terbagi atas komoditas MIGAS hanya sebanyak 4.2 ribu Dollar Amerika Serikat dan komoditas non-MIGAS sebanyak 1,013,245.9 Dollar Amerika Serikat. Sedangkan sektor impor tercatat dengan total sebanyak 1,424,313.2 Dollar Amerika Serikat dengan komoditas MIGAS sebanyak 6,033.7 ribu Dollar Amerika Serikat dan komoditas non-MIGAS sebanyak 1,418,279.5. Perdagangan Indonesia dan Perancis ini tercatat mengalami defisit sebanyak -411,063.2 Dollar Amerika Serikat.

Pada tahun 2019 kegiatan perdagangan antara Indonesia dan Italia menghasilkan total nilai ekspor sebanyak 1,749,309.1 Dollar Amerika Serikat dengan pendapatan dari komoditas MIGAS hanya sebanyak 0.1 ribu Dollar Amerika Serikat dan sektor non-MIGAS sebanyak 1,749,309.0 Dollar Amerika Serikat. Total nilai pendapatan dari kegiatan impor dari Italia adalah 1,776,576.3 dengan komoditas MIGAS sebanyak 252.4 ribu Dollar Amerika Serikat dan sektor non-MIGAS sebanyak 1,776,323.9. Perdagangan antara Indonesia dan Italia ini tercatat mengalami defisit sebanyak -27,267.2 Dollar Amerika Serikat.

Table 2.2. : Data ekspor dan impor komoditas MIGAS dan non-MIGAS Indonesia dan Belanda.

Uraian	2018	2019	2020
Total Perdagangan	5,135,848.1	4,036,963.0	3,918,028.8
MIGAS	109,174.3	149,066.7	57,904.1
Non-MIGAS	5,026,673.8	3,887,896.3	3,860,124.8
Ekspor	3,896,594.2	3,204,951.0	3,113,699.0
MIGAS	60,902.0	147,664.3	56,241.4
Non-MIGAS	3,835,692.2	3,057,286.7	3,057,457.5
Neraca Perdagangan	2,657,340.4	2,372,938.9	2,309,369.1
MIGAS	12,629.7	146,261.8	54,578.8
Non-MIGAS	2,644,710.7	2,226,677.1	2,254,790.2

Sumber: (Portal Statistik Perdagangan, 2021).

Pada tahun 2020 tercatat perolehan hasil penjualan bahan non-migas sebanyak 3.057.457 US\$ dan bahan migas hanya sebanyak 56.241 US\$. Dalam kurun tiga tahun tersebut dapat terlihat bahwa perolehan hasil yang didapat dari penjualan barang hasil non-migas yang dibeli oleh Belanda mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019 dan 2020. Sedangkan untuk pendapatan ekspor bahan hasil migas dari tahun 2018 ke 2019 mengalami sedikit kenaikan dan menurun kembali di tahun 2020 (Kementerian Perdagangan, 2019).

2.2. Komoditas Unggulan Uni Eropa dan Indonesia

Indonesia sendiri memiliki komoditas-komoditas yang menjadi bahan ekspor ke negara-negara anggota Uni Eropa dan juga negara mitra dangang Indonesia lainnya. Seperti Minyak Olahan Kelapa Sawit, hasil bahan tambang

seperti nikel dan bijih besi. Sedangkan Uni Eropa banyak menjual barang-barang hasil olahan industri yang sudah siap pakai seperti mesin, peralatan dan kendaraan bermotor.

Untuk komoditas ekspor non-MIGAS yang dimiliki Indonesia juga beragam. Seperti udang, kopi, kakao, karet, bahan-bahan elektronik, komponen kendaraan bermotor, serta furnitur dan peralatan rumah tangga. Berbagai komoditas tersebut dikirim ke berbagai negara di seluruh dunia seperti Arab Saudi, Iran, Afrika Selatan, Korea, Tiongkok, hingga negara-negara anggota Uni Eropa.

Perkembangan hasil total nilai ekspor Indonesia di sektor non-MIGAS ke negara-negara mitra dagangnya dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 memiliki kenaikan yang bertahap. Pada tahun 2018 Indonesia memiliki nilai total ekspor pada bidang pertanian sebanyak 3,431.0 juta Dollar Amerika Serikat, pada tahun 2019 dengan total sebanyak 3,612.4 juta Dollar Amerika Serikat dan pada tahun 2020 memiliki total sebanyak 4,119.0 juta Dollar Amerika Serikat (Portal Statistik Perdagangan, 2021).

Tetapi komoditas yang paling menonjol dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa adalah sumber daya alam. Minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* merupakan salah satu komoditas primadona Indonesia yang terus dilirik oleh Uni Eropa. Produksi Minyak kelapa sawit yang memakan waktu singkat dan hasil akhir olahan yang beragam serta harga yang relatif murah menjadikan Minyak kelapa sawit terus berada di peringkat atas dalam komoditas ekspor Indonesia ke Uni Eropa.

Negara-negara Uni Eropa sendiri memiliki kemampuan pengolahan bahan dasar yang lebih baik dan juga memiliki alat dan teknologi yang mutakhir dalam

membantu mereka untuk bisa mengolah bahan dasar yang relatif murah menjadi bahan olahan yang hasil akhirnya memiliki nilai jual yang tinggi. Bahan dasar yang di impor oleh Uni Eropa dari berbagai mitra dagangnya meliputi; olahan besi, bahan kimia, tekstil, serta karet dan plastik (Eurostat, 2021).

Bahan-bahan dasar tersebut kemudian diolah oleh negara-negara Uni Eropa yang kemudian menjadi komoditas ekspor siap pakai yang memiliki nilai jual tinggi. Seperti komputer, kendaraan bermotor, mesin, peralatan, peralatan kesehatan, obat-obatan, dan bahan kimia. Pada komoditas mesin, negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Italia, Belanda, Perancis serta Belgia memegang peranan penting dalam produksinya, yang pada tahun 2020 berhasil meng-ekspor mesin siap pakai dengan total nilai ekspor sebanyak 1,9 Triliun Euro. Adapun komoditas- komoditas lain seperti kendaraan bermotor (52.5%), obat-obatan(23.3%), dan komputer (32.6%) masih menjadi hasil produk utama dari Jerman yang menduduki peringkat atas dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya (Eurostat, 2021).

Uni Eropa Sendiri memiliki beberapa bahan komoditas ekspor yang menjadi favorit di Indonesia seperti mesin dan bahan kimia, namun komoditas- komoditas lainnya sebagian besar masih berupa bahan-bahan dasar yang belum di olah menjadi produk akhir yang bernilai jual tinggi seperti makanan dan hewan hidup, minuman dan tembakau, dan bahan bakar mineral (European Commission, 2021).

2.3. Hubungan Ekspor CPO Indonesia dan Uni Eropa

Kelapa sawit atau dengan nama ilmiah *Elaeis guineensis* berasal dari pedalaman hutan hujan tropis di wilayah Afrika Barat. Pada saat itu tanaman ini masih dibudidayakan oleh para petani individu lokal dengan produksi skala kecil

dengan rata-rata luas kepemilikan lahan sekitar 7.5 hektar. Hasil olahan kelapa sawit ini juga belum dikenalkan ke dunia barat pada saat itu, yang mana kemudian pada tahun 1811 negara-negara Eropa secara komersil mendagangkan minyak kelapa sawit dari Afrika ke Eropa (Suseno Budidarsono, 2013, hal. 176).

Perkembangan industri penanaman kelapa sawit dan hasil olahannya di Indonesia sendiri diawali di era kolonial, dengan diperkenalkannya tanaman tersebut oleh penyetap kolonial barat di wilayah pantai timur pulau Sumatera. Dengan dimulainya industri baru ini, minyak kelapa sawit berkembang dengan pesat di wilayah pantai timur Sumatera di bawah administrasi Belanda. Pada tahun 1919 hasil olahan kelapa sawit tercatat dengan total berat 181 ton menjadi 190.627 ton pada tahun 1937. Seiring dengan suksesnya industri yang baru dimulai ini, para penyetap kolonial pada saat itu juga memperluas dari wilayah penanaman yang kemudian meningkat signifikan. Luas dari lahan penanaman pertama yang didirikan sekitar pada tahun 1910-1914 adalah 2,260 hektar yang kemudian meluas menjadi 6,920 hektar pada tahun 1919. Kemudian dari tahun ke tahun mengalami perluasan hingga mencapai 75.000 hektar dengan 63,234 hektar wilayah tanam yang sudah memproduksi kelapa sawit (Suseno Budidarsono, 2013, hal. 176).

Selepas terjadinya proklamasi dan perginya para koloni, tidak banyak diketahui tentang bagaimana industri kelapa sawit berkembang pada saat itu. kemudian setelah berakhirnya masa jabatan Presiden Soekarno dan digantikan oleh Presiden Soeharto perkembangan industri kelapa sawit Indonesia beserta komoditas lainnya mulai dilancarkan kembali. Pada awal masa kepemimpinan Presiden Soeharto, beliau mengagaskan peningkatan untuk sektor perindustrian

Indonesia dengan dilakukannya transmigrasi besar-besaran dari Jawa ke Kalimantan dan Sumatera. Presiden Soeharto juga mempermudah para transmigran dengan mengintstuksikan Kementerian kehutanan untuk memberikan izin pembabatan hutan dan pembukaan lahan selama kegiatan transmigrasi ini berlangsung (Wulansari, 2017, hal. 12).

Dengan diterbitkannya kemudahan pemberian izin pembabatan hutan tersebut para transmigran dan juga pemerintah gencar melakukan pembukaan lahan dengan penebangan kayu, yang kemudian selanjutnya kayu-kayu hasil lahan tersebut kemudian diolah kembali menjadi kayu papan hingga *plywood* yang kemudian bisa membantu mendongkrak perekonomian masyarakat dan juga Pemerintah Indonesia. Tidak hanya industri kayu, pemerintah juga mendorong para pengusaha dan juga perkebunan Pemerintahan untuk melakukan ekspansi industri kelapa sawit. Untuk mempermudah para pengusaha untuk mengembangkan industri kelapa sawit mereka, Presiden Soeharto kemudian memperkenalkan program Perkebunan Inti Rakyat atau PIR. Melalui program tersebut kemudian pemerintah mengembangkan proyek *Nucleus Estate Smallholder* atau NEU yang memfokuskan pengembangan komoditas pertanian yang meliputi kelapa sawit, kelapa hibrida, karet, teh, tebu, kapas, dan kakao (Wulansari, 2017, hal. 12).

Maka dari itu pengembangan industri kelapa sawit yang dimulai pada era kolonial berlanjut hingga jaman orde baru yang kemudian menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki potensi dan produksi tertinggi untuk komoditas kelapa sawit beserta olahannya. Hal ini kemudian membuat Indonesia memasarkan produk minyak kelapa sawit mereka ke berbagai mitra

dagangnya di benua Amerika, Timur tengah, Asia, dan juga Eropa. Negara Eropa yang memiliki jumlah impor minyak kelapa sawit dari Indonesia yang terbanyak adalah Belanda.

Table 2.3. : Data total berat bersih ekspor minyak kelapa sawit ke Negara-negara anggota Uni Eropa.

Berat Bersih: 000 ton			
Negara Tujuan	2018	2019	Total
Belanda	1 161,1	914,9	2.076,0
Spanyol	1 168, 6	1 078,8	2.247,4
Italia	888, 9	751, 3	1.641,2

Dikutip dari : (Badan Pusat Statistik, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik Perdagangan diantara 27 negara anggota Uni Eropa, hanya tiga negara saja yang tercatat memiliki aktivitas impor minyak kelapa sawit dari Indonesia namun dalam kurun dua tahun terus mengalami penurunan. Dimulai dari Belanda yang tercatat mengalami penurunan impor dari Indonesia sebanyak 246,2 ribu ton berlanjut ke Spanyol yang mengalami penurunan sebanyak 89,6 ribu ton dan terakhir Italia yang juga mengalami penurunan sebanyak 137,6 ribu ton.

Table 2.4. : Nilai *Free on Board* (FOB) dari aktivitas impor kelapa sawit Indonesia ke Belanda, Spanyol, dan Italia.

Nilai FOB : 000 000 US \$			
Negara Tujuan	2018	2019	Total
Belanda	711,6	480,2	1.191,8
Spanyol	718,7	572,0	1.290,7
Italia	544,8	410,2	955,0

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019).

Tabel di atas merupakan data yang mencakup pendapatan *free on board* yaitu harga atau penawaran dari suatu komoditas sampai di atas kapal, dari ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Dari data di atas bisa dilihat bahwa dalam kurun waktu dua tahun nilai pendapatan ekspor dari minyak kelapa sawit ini menurun. Salah satu penyebab penurunan volume ekspor ini adalah dipengaruhi oleh faktor meningkatnya konsumsi dalam negeri untuk minyak kelapa sawit. Total dari konsumsi minyak sawit pada keperluan domestik pada tahun 2019 ini mencapai sekitar 15,56 juta ton. Terlebih lagi Pertamina juga turut mengkonsumsi stok minyak sawit domestik untuk diolah menjadi bio solar. Pertamina (persero) juga merencanakan untuk mengolah minyak sawit menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan lagi atau *Green Gasoline* dan *Green LPG* (Redaksi Majalah Sawit Indonesia, 2019).

2.4. Pemberlakuan kebijakan RED II oleh Uni Eropa dan Respons Domestik Indonesia

Indonesia dengan tingkat produksi kelapa sawit serta olahannya yang bisa mencukupi penggunaan dalam negeri dan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke luar negeri menjadikan komoditas ini sebagai salah satu komoditas yang menguntungkan Indonesia. Namun dengan diterbitkannya kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) oleh Uni Eropa sebagai bentuk dari keseriusan dalam penegakan standar emisi gas buang kendaraan yang lebih baik dan juga sebagai upaya mereka dalam mengurangi penggunaan bahan bakar yang pengolahannya dianggap tidak ramah lingkungan. RED II ini digagaskan dengan tujuan agar sumber dari *biofuel* yang pada konteks ini bahan bakunya

adalah minyak olahan kelapa sawit, bisa diproduksi dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan tidak menyebabkan deforestasi (Samuel Pablo, 2019).

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Committee on the Environment, Public Health and Food Safety*, perwakilan negara-negara Uni Eropa berpendapat bahwa deforestasi yang dilakukan oleh banyak industri penanaman kelapa sawit dengan cara pembakaran dan penggundulan hutan secara berlebihan bisa menyebabkan erosi, polusi udara, pencemaran tanah dan air, serta perubahan iklim dalam jangka panjang. Selain itu hilangnya satwa beserta habitatnya juga merupakan hasil dari deforestasi yang berlebihan terjadi pada ekspansi industri kelapa sawit, yang mana hal tersebut sangat ditentang oleh mereka (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, 2017).

Pengurangan impor minyak sawit masuk ke Uni Eropa ini disinyalir akan mengalami pengurangan pada tahun 2024 dan akan menghentikan impor sepenuhnya diperkirakan pada tahun 2030. Kendati demikian beberapa dari produsen minyak kelapa sawit Indonesia sudah melakukan perbaikan dalam proses penanaman dan pengolahan kelapa sawit mereka sesuai dengan standar pasar Eropa dan Amerika Serikat. Tetapi perkembangan di lapangan masih tergolong lambat dan masih belum mencakup sebagian besar dari keseluruhan produsen minyak sawit Indonesia (BBC News, 2019).

Pemerintah beserta para produsen minyak kelapa sawit Indonesia merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Karena volume ekspor ke Uni Eropa dan juga volume produksi minyak kelapa sawit dalam negeri akan terhambat dan terganggu. Dengan demikian Pemerintah Indonesia resmi mengajukan gugatan

terhadap Uni Eropa melalui organisasi perdagangan dunia atau WTO pada 9 Desember 2019 (Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2019).

Maka dari itu timbulnya tekanan-tekanan dari domestik Indonesia yang mendorong Pemerintah agar segera melakukan tindakan atas isu embargo ini. mulai dari tekanan dari pemangku kepentingan yang berada di birokrasi Pemerintahan hingga masyarakat yang tergabung dalam organisasi non- Pemerintah.



BAB III

APLIKASI TEORI *DECISION MAKING*

Pada bab sebelumnya telah memaparkan apa saja komoditas andalan Uni Eropa dan Indonesia, Hubungan Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa, serta Hubungan Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Dengan landasan konteks yang diuraikan pada bab sebelumnya, bab ini akan membahas tentang bagaimana respons dari Pemerintah Indonesia dalam menghadapi embargo minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam menghadapi isu tersebut.

3.1. Politik Domestik

Permasalahan yang terjadi dalam hubungan dagang Indonesia dan Negara-negara Uni Eropa ini tentunya memberi dampak yang cukup terlihat terhadap keadaan politik ekonomi Indonesia. Pemerintah dan pengusaha serta para aktor berkepentingan harus berputar otak untuk bisa menanggulangi tantangan dari Uni Eropa ini. Pemerintah dalam hal ini harus mencari cara untuk bagaimana para produsen minyak kelapa sawit bisa menaikkan volume produksi mereka dan juga harus bisa menekankan kepada para produsen agar terciptanya pengolahan minyak kelapa sawit yang ramah terhadap lingkungan sekitar area industri ini. Tidak hanya itu Pemerintah harus bisa menyusun strategi untuk bisa kembali memasarkan minyak kelapa sawit beserta olahannya ke Negara-negara Uni Eropa dan juga mencari mitra dagang baru yang dianggap lebih baik untuk berhubungan dagang dalam jangka panjang.

Sedangkan para aktor berkepentingan harus bisa meyakinkan para pembuat kebijakan agar bisa tetap memasarkan produk mereka di pasar global dan tentunya juga di Negara-negara Uni Eropa sebagai salah satu pasar yang konsumsi minyak sawit yang tinggi, mengingat para aktor berkepentingan memiliki peranan penting pada permasalahan seperti ini. Searah dengan yang diungkapkan oleh Coplin tentang bagaimana aktor berkepentingan memiliki peranan penting dalam kondisi politik domestik.

Coplin berpendapat dalam bukunya bahwa dalam pengambilan keputusan ada empat buah struktur sistem yang bisa mempengaruhi arah diambilnya suatu kebijakan yaitu; birokrat yang mempengaruhi, partai yang mempengaruhi, kepentingan yang mempengaruhi, dan massa yang mempengaruhi. Dari keempat sistem tersebut hal yang paling mencerminkan yang terjadi pada konteks politik ekonomi domestik minyak kelapa sawit ini adalah kepentingan yang mempengaruhi (Coplin, 1992, hal. 87).

3.1.1 Kepentingan yang Mempengaruhi

Para aktor kepentingan yang mempengaruhi di sini adalah sekelompok orang yang mempunyai suatu tujuan tertentu yang kemudian diarahkan kepada para pembuat kebijakan sesuai kepentingan mereka, yang mana kepentingan disini berdasar kepada kepentingan ekonomi (Coplin, 1992, hal. 87). Maka dari itu para pengusaha industri minyak kelapa sawit dengan kepentingan ekonomi mereka memiliki kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah para pengusaha-pengusaha tersebut memiliki sumber daya untuk bisa memberi dukungan yang cukup untuk para pejabat entah secara finansial maupun dukungan suara massa ketika pemilihan umum. Para aktor berkepentingan di sini juga sering kali mempunyai

hubungan kerabat dengan para pembuat kebijakan. Hal tersebut juga mempermudah mereka dalam mempengaruhi arah dari suatu kebijakan yang akan diambil.

Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 kemarin mengatakan bahwa dengan berkurangnya volume ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa bisa menjadi peluang besar bagi pengusaha sawit Indonesia. Karena menurut beliau produksi sawit Indonesia akan difokuskan kepada pengolahan biodiesel B20 dan B30 yang diharapkan bisa mendongkrak harga sawit dan juga menyerap volume produksi sawit Indonesia (Fauzia, 2019). Dari pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut bisa disimpulkan bahwa ada kelompok kepentingan yang telah mempengaruhi arah keputusan Presiden untuk kemudian memilih mengolah sendiri komoditas sawit yang tersedia untuk dijadikan bahan bakar.

Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi para pengusaha minyak kelapa sawit yang beberapa tahun terakhir ini mengalami volume ekspor dan juga harga minyak sawit yang kian menurun akibat dari kurangnya permintaan. Desakan dari para pemangku kepentingan ini juga bisa membantu Pemerintah Indonesia untuk bisa memaksimalkan potensi sawit untuk digunakan secara domestik, dengan demikian penyusunan strategi perdagangan sawit Indonesia dengan mitra dagang internasional bisa lebih optimal dalam menghadapi penurunan daya beli. Namun para aktor berkepentingan ini memiliki kecenderungan untuk menyuarakan kepentingan mereka hanya untuk keuntungan mereka sendiri, walaupun mereka seolah-olah berkepentingan untuk menguntungkan semua pihak (Coplin, 1992, hal. 98).

Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk harus jeli dalam memutuskan suatu perkara yang mana apabila keliru bisa merugikan Negara untuk jangka panjangnya. Kerugian yang dimaksud karena adanya desakan dari pasar internasional yang menuntut Indonesia agar bisa mengubah cara produksi minyak sawit menjadi lebih ramah lingkungan, namun dengan desakan para pengusaha sawit yang terus memberikan tekanan kepada Pemerintah yang kemudian untuk tetap memasarkan produk minyak sawit yang tidak memenuhi standar ramah lingkungan bisa mengakibatkan diblokirnya sawit Indonesia dari pasar dunia untuk sepenuhnya.

Maka dari itu Pemerintah harus bisa menghadapi tekanan-tekanan yang diberikan oleh Pengusaha sawit untuk bisa membuat sebuah kebijakan yang tidak hanya bisa menguntungkan bagi Pemerintah Indonesia serta juga para pengusaha sawit dan tentunya untuk bisa menjadi kebijakan yang optimal di waktu jangka panjangnya. Namun para pemangku kepentingan terus memberikan tekanan kepada pemerintah mengingat konflik minyak kelapa sawit Indonesia dengan Uni Eropa ini sudah melibatkan Parlemen Uni Eropa dan Komisi Eropa (Prasetyo, 2018).

Mengingat demikian maka dari itu Pemerintah didesak untuk bisa bernegosiasi dengan Uni Eropa agar bisa menemukan solusi yang bisa menguntungkan semua pihak. Diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia ini dinilai para pengusaha CPO di Indonesia melanggar prinsip perdagangan Uni Eropa yang menjunjung tinggi perdagangan adil atau *fair trade* (Prasetyo, 2018). Maka dari itu Pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan dalam menanggulangi permasalahan embargo

minyak kelapa sawit ini harus bisa melihat bagaimana negosiasi bersama Uni Eropa bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang bisa menguntungkan bagi para pengusaha kelapa sawit dan juga Pemerintah tentunya.

Langkah Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus ini adalah dengan ingin mempersiapkan sebuah diskusi dengan perwakilan Uni Eropa tentunya sudah bisa dikatakan sebagai jalan untuk mencari solusi yang baik. Mengingat juga bahwa dengan jalannya diskusi tersebut maka permasalahan-permasalahan yang dimiliki Uni Eropa terhadap sawit Indonesia bisa tersampaikan dengan baik. Seperti pada penanaman dan pengolahan kelapa sawit Indonesia yang dinilai tidak ramah lingkungan serta tidak berkelanjutan dan juga penebangan hutan yang berlebihan akibat terus diperluaskannya lahan penanaman kelapa sawit bisa menghilangkan habitat beserta isinya yang seharusnya bisa lestari. Serta dampak jangka penjangnya yang berupa pencemaran tanah dan air, perubahan cuaca yang ekstrim serta iklim yang semakin menghangat.

Pemerintah Indonesia juga kemudian bisa menjelaskan kepada perwakilan Uni Eropa tentang bagaimana keadaan produksi minyak sawit Indonesia yang perlahan-lahan mulai membenahi jalan pengolahan komoditas minyak sawitnya dan juga menjelaskan bahwa bagaimana komoditas kelapa sawit ini memegang peran yang sangat besar dalam roda perekonomian Indonesia yang memiliki banyak sekali orang yang bergantung kepada industri ini. Dengan dikurangi dan kemungkinan untuk dihentikan dalam beberapa tahun kedepan ini bisa memperlambat roda perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Permasalahan komoditas sawit Indonesia yang juga di diskriminasi oleh Uni Eropa ini juga diharapkan bisa menemukan solusinya yang kemudian tinggal

bagaimana Pemerintah Indonesia kemudian bisa menyusun kebijakan yang bisa menguntungkan para pengusaha sawit Indonesia dan Pemerintah.

Adapun hal lain yang juga berperan penting dalam kondisi politik domestik suatu negara yang kemudian bisa mengarahkan bagaimana suatu kebijakan akan ditetapkan adalah isu internasional. Isu internasional sendiri memegang peranan penting dalam konteks ini, mengingat para pemegang kepentingan pastinya akan terpengaruh oleh bagaimana isu internasional yang sedang dihadapi oleh negaranya. Kemudian mereka akan menyuarakan kepentingan mereka kepada para pembuat kebijakan dan memberi tekanan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah kebijakan yang akan dibuat.

Coplin dalam bukunya berpendapat bahwa isu internasional merupakan sebuah kejadian yang meliputi perselisihan teritorial, kebijakan persahabatan antar negara, serta permusuhan antar negara yang mana di setiap negara di dunia para penduduknya memiliki sikap-sikap tertentu terhadap negara lain atau isu-isu yang berkembang di dunia internasional yang menyangkut negara lain yang menimbulkan tekanan kepada para pembuat kebijakan yang dituntut agar bisa mengikuti sebuah kebijakan yang bersifat spesifik tersebut (Coplin, 1992, hal. 99).

Adapun faktor isu internasional di sini sangat berperan penting. Mengingat hadirnya tekanan dari pemangku kepentingan kemudian dapat mengarahkan Pemerintah selaku pembuat kebijakan. Konflik minyak sawit Indonesia dengan Uni Eropa ini kemudian mengarahkan bagaimana para pengusaha kemudian dituntut untuk bisa membenahi prosedur dalam memproduksi komoditas minyak sawit mereka. Pemerintah juga melihat dengan adanya tekanan dari isu embargo

minyak kelapa sawit akibat adanya RED II ini akhirnya membuat para pembuat kebijakan untuk bisa membenahi komoditas minyak kelapa sawit mereka. Serta Pemerintah dituntut untuk bisa mengerti tentang apa yang menjadi permasalahan yang dikeluhkan oleh Uni Eropa tentang kelapa sawit Indonesia.

Dengan demikian kemungkinan untuk tercapainya keuntungan bagi perusahaan minyak kelapa sawit Indonesia dan Pemerintah bisa terjadi. Akan tetapi melihat dari perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah masih belum bisa memberikan tekanan yang cukup kepada para pengusaha-pengusaha pengolahan kelapa sawit ini. Mengingat masih banyaknya pengolahan minyak kelapa sawit yang menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan. Para produsen sawit ini tidak semuanya merupakan sebuah perusahaan besar yang mempunyai izin resmi kepada Pemerintah daerah maupun pusat. Dikarenakan masih banyaknya perusahaan-perusahaan kecil dan juga individu yang turut berpartisipasi dalam industri besar di Indonesia ini membuat pengawasan dari jalan kerja operasi penanaman dan pembukaan lahan sawit mereka masih terbatas.

Hal tersebut seharusnya sudah menjadi perhatian Pemerintah daerah dan juga pusat. Mengingat faktor itu yang merupakan awal mula dari terbentuknya permasalahan embargo kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa ini. Isu internasional ini juga mencerminkan hal demikian. Dengan tingginya tingkat kebakaran hutan, pencemaran air dan tanah, serta luas hutan yang semakin sedikit menjadi perhatian penting bagi Uni Eropa dan hal tersebut selalu menjadi pembahasan yang terjadi di antara diskusi-diskusi dalam upaya untuk penyelesaian masalah embargo ini. Terlebih lagi dengan menurunnya volume ekspor ke Uni Eropa berdampak juga kepada harga minyak kelapa sawit yang kian menurun dalam

waktu dua tahun terakhir ini. Namun dengan para pemangku kebijakan yang masih tidak mematuhi arahan-arahan untuk menjadikan produksi kelapa sawit Indonesia menjadi lebih baik membuat masalah ini masih jauh dari kata penyelesaian.

Dengan berkurangnya volume ekspor ke Uni Eropa, Indonesia kembali dihadapkan dengan pilihan-pilihan untuk mencari pasar baru untuk kelapa sawitnya atau tetap memperjuangkan nama baik kelapa sawit Indonesia yang sudah semakin buruk. Beruntungnya Indonesia memiliki beberapa mitra dagang kelapa sawit yang juga membeli dengan jumlah banyak. Seperti Tiongkok dan India. Kedua negara tersebut meng-impor minyak kelapa sawit dari Indonesia dengan jumlah yang melebihi negara-negara Uni Eropa seperti Belanda, Spanyol dan Italia. Hal ini terjadi akibat dengan adanya resolusi RED II yang akhirnya membuat pasar minyak sawit Indonesia di negara-negara Uni Eropa kian melemah setiap tahunnya.

Table 3.1. : Ekspor minyak sawit Indonesia ke India dan Tiongkok

Negara Tujuan	Berat bersih 000 ton		
	2018	2019	Total
India	6.346,2	4.576,6	10.922,8
Tiongkok	4.166,5	5.791,1	9.957,6

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dapat dilihat dari Tabel 3.1 bahwa volume ekspor ke India dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Namun dengan total perdagangannya melebihi Tiongkok, yang mengalami kenaikan volume ekspor pada tahun 2018 ke 2019 melebihi total ekspor ke negara-negara Uni Eropa. Maka dari itu Tiongkok dan India merupakan dua mitra dagang Indonesia yang memiliki potensi besar

untuk bisa menggantikan posisi negara-negara Uni Eropa sebagai negara untuk memasarkan produk olahan kelapa sawit Indonesia. Hal ini tentunya memberikan posisi untung bagi Indonesia. Melihat bagaimana potensi tersebut bisa kembali membangkitkan industri kelapa sawit yang sempat lesu dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian tugas Pemerintah pada saat ini adalah untuk menjawab tantangan dari Uni Eropa untuk olahan minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan serta tekanan dari para pengusaha kelapa sawit Indonesia untuk peningkatan volume ekspor yang bisa kembali menaikkan harga jual minyak kelapa sawit.

Lalu dengan melihat beberapa faktor yang dipaparkan oleh William D. Coplin tadi yang menjelaskan apa saja yang mempengaruhi bagaimana kebijakan dari sebuah negara akan dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tekanan dari pemangku kepentingan dan juga isu internasional. Maka dari itu ketika melihat faktor-faktor di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah akan melihat bagaimana kondisi perindustrian kelapa sawit Indonesia serta memperhatikan permasalahan yang diutarakan oleh perwakilan negara-negara Uni Eropa tentang bagaimana kualitas pengolahan sawit Indonesia yang perlu ditingkatkan kembali. Namun dengan banyaknya industri sawit yang masih belum terdata yang sebagian besar dari mereka juga menggunakan metode-metode yang tidak ramah lingkungan dalam memulai dan meluaskan industri kelapa sawit mereka.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain seperti mencari pasar baru untuk komoditas ekspor kelapa sawit Indonesia, terus melakukan lob ke Uni Eropa untuk sekiranya dapat melonggarkan standar resolusi RED II mereka agar kelapa sawit Indonesia bisa kembali

dipasarkan di negara-negara Uni Eropa, atau menyerap dan memakai sendiri komoditas sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik. Para pembuat kebijakan juga harus melihat bagaimana faktor-faktor dari dalam negeri yang misalnya seperti para pekerja sawit yang menggantungkan hidupnya mencari nafkah di Industri ini. Namun dengan adanya operasi pembukaan lahan sawit yang tidak sesuai standar membuat hal tersebut menjadi bumerang yang kembali mengarah ke Pemerintah. Karena apabila Pemerintah tetap memasarkan Komoditas sawitnya dengan pengolahan yang merusak lingkungan maka tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan hasil yang buruk bagi Indonesia. Namun dengan demikian Indonesia juga tidak bisa tinggal diam dan harus kembali memasarkan sawitnya ke pasar Internasional. Dengan hadirnya negara-negara yang mengimpor minyak kelapa sawit terbanyak Indonesia non-Uni Eropa, seperti India dan Tiongkok, bisa menjadi pilihan destinasi ekspor alternatif Indonesia. Hal ini diperlukan agar Indonesia dapat kembali memasarkan komoditas ekspor minyak kelapa sawit dengan nilai yang tinggi.

3.1.2. Birokrat yang mempengaruhi

Di dalam proses pembuatan sebuah kebijakan, tentunya ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang berusaha mengedepankan kepentingan mereka agar bisa sampai ke para pembuat kebijakan. Hal ini sudah lumrah terjadi pada Pemerintahan negara-negara dimana saja tidak terkecuali di Indonesia. Aktor birokrat yang mempengaruhi ini adalah individu atau organisasi yang mempunyai akses didalam ruang lingkup Pemerintahan, yang bertugas untuk mempengaruhi

para pembuat kebijakan. Tidak hanya itu, para aktor birokrat ini juga bergerak sebagai pemberi informasi bagi para pembuat kebijakan (Coplin, 1992, hal. 82-83).

Adanya figur-figur Pemerintahan yang juga memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti Sandiaga Uno dengan perusahaannya yang bernama PT Provident Agro Tbk dan Luhut Binsar Panjaitan yang telah menguasai sebagian besar saham dari PT Perkebunan Kaltim Utama, menguatkan adanya pengaruh dari mereka kepada para pembuat kebijakan lain.

Isu embargo minyak kelapa sawit Indonesia ini tentunya memantik para-pemangku kepentingan yang mempunyai akses di dalam area Pemerintahan untuk memberikan informasi-informasi di lapangan kepada para pembuat kebijakan untuk bisa mempertimbangkan ke mana arah kebijakan ini. Seperti contohnya para pengusaha-pengusaha minyak kelapa sawit yang mendesak Pemerintah untuk bisa mencari pasar baru sebagai pengganti Uni Eropa. Melihat potensi dari India, Pakistan dan Bangladesh yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir membeli minyak sawit dari Indonesia dengan jumlah yang cukup banyak (GAPKI, 2019).

Table 3.2. : Ekspor minyak sawit Indonesia ke India, Pakistan, dan Bangladesh.

Negara Tujuan	Berat bersih 000 ton.		
	2018	2019	Total
India	6 346,2	4 576,6	10 922,8
Pakistan	2 458,5	2 215,9	4 674,4
Bangladesh	1 402,3	1 351,5	2 753,8

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021).

3.1.3. Partai yang Mempengaruhi

Pengambilan sebuah keputusan dari para *decision maker* tentunya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh para aktor pemangku kepentingan, seperti para pengusaha dan juga politisi-politisi yang memiliki keperluan tertentu. Tentunya keberadaan politisi ini tidak terlepas dari Partai yang menjadi alat untuk bisa memfasilitasi mereka agar bisa menjadi tokoh yang kepentingan dan keperluan yang dimiliki oleh mereka bisa disampaikan kepada para pengambil kebijakan.

Menurut Coplin dalam bukunya peran Partai dalam suatu proses pengambilan kebijakan suatu negara sangatlah krusial. Dengan peran mereka sebagai penghubung dari para masyarakat untuk bisa menyampaikan kepentingan mereka kepada para pembuat kebijakan. Agar faktor-faktor yang terjadi di lapangan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi berjalannya kebijakan yang akan di ambil (Coplin, 1992, hal. 84-85).

Seperti pada yang terjadi pada Partai Golkar dan PDIP. Kedua partai tersebut memiliki keterlibatan aktif dalam membahas Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan. Dari hasil laporan tercatat sebanyak 53% anggota Balai Legislatif mendukung disahkannya RUU Perkelapasawitan dan Partai Golkar serta PDIP merupakan fraksi yang mengusulkan untuk pengesahan RUU tersebut (Deforestasi, 2019).

Adanya keinginan dari anggota dari Baleg ini untuk mendukung disahkannya RUU tersebut tentunya didasari oleh kepentingan-kepentingan para masyarakat dan juga pengusaha yang memiliki hubungan dengan para anggota Partai tersebut. Maka dari itu para anggota Badan legislatif ini akan menyuarakan kepentingan mereka kepada para pembuat kebijakan.

Namun dari Fraksi PKS tidak setuju mengenai disahkannya RUU Perkelapasawitan ini. karena menurut mereka masih memiliki banyak kekurangan. Melihat RUU ini kurang membahas tentang aspek dasar dalam tata kelola industri kelapa sawit Indonesia, khususnya yang membahas tentang kesejahteraan petani dan perlindungan tenaga kerja.

3.1.4. Massa yang Mempengaruhi

Kepentingan yang dimiliki oleh Masyarakat luas tentunya tidak selalu bisa tersampaikan kepada para pembuat kebijakan. Terlebih lagi kalau masyarakat tersebut tidak memiliki akses ke rana Pemerintahan untuk bisa mempengaruhi kebijakan mereka, yang mana hal tersebut akan lebih mempersulit untuk kepentingan mereka agar bisa tersampaikan.

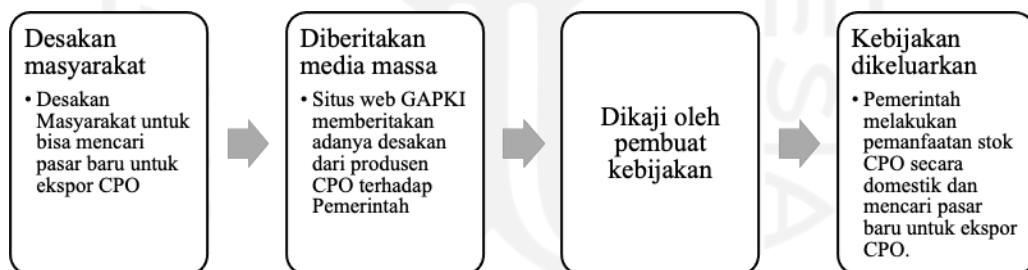
Kepentingan dari masyarakat luas ini tentunya memiliki dampak yang beraneka ragam terhadap sebuah kebijakan yang akan diambil. Mengingat bahwa Pemerintah juga memiliki kapasitas untuk memanipulasi pemikiran masyarakat. Sehingga kepentingan yang disuarakan masyarakatpun bisa berubah ataupun tidak akan sama dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebelumnya. Namun dengan adanya sistem Pemerintahan terbuka tentunya hal tersebut bisa diminimalisir. Kepentingan masyarakat pada sistem pemerintahan terbuka seringkali disuarakan lewat media massa (Coplin, 1992, hal. 88-89).

Desakan masyarakat untuk Pemerintah agar bisa mengurangi ekspansi dari kebun-kebun kelapa sawit yang rencananya akan dikelola menjadi bahan bakar bio diesel B-20. Masyarakat menilai dengan area plantasi yang ada sekarang ini masih belum menghasilkan produksi yang maksimal. Maka dari itu perluasan

wilayah perkebunan kelapa sawit ini dinilai berlebihan dan akan terus merusak lingkungan dalam jangka panjang (Walhi Desak Pemerintah Buat Road Map Kelapa Sawit untuk Biodiesel., 2018).

Perkumpulan masyarakat yang tergabung didalam organisasi non-pemerintah Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI dalam hal ini meminta Pemerintah untuk kembali memepertimbangkan rencana pembukaan lahan kelapa sawit baru ini. pembukaan lahan ini berpotensi utnuk merusak habitat dari flora dan fauna endemik dari suatu daerah. Maka dari itu WALHI disini juga mempunyai peran dalam menyampaikan kepentingan masyarakat dalam permasalahan rencana perluasan kebun kelapa sawit ini kepada Pemerintah, agar dibataalkannya rencana tersebut.

Gambar 3.1. : Peran Massa dalam Mempengaruhi Kebijakan Pembuat Keputusan.



3.2. Faktor Ekonomi dan Militer

Untuk melihat bagaimana arah kebijakan yang akan diambil oleh Indonesia untuk menghadapi embargo minyak kelapa sawit Uni Eropa tentunya kita harus melihat bagaimana keadaan ekonomi dari negara-negara Uni Eropa pengimpor tertinggi minyak kelapa sawit Indonesia serta kondisi ekonomi domestik Indonesia sendiri. Tentu saja tidak hanya kondisi ekonomi domestik saja

yang memiliki peranan penting dalam menentukan kekuatan dan kapabilitas suatu negara, peranan kekuatan militer juga bisa menentukan keadaan dari suatu negara dan juga arah kebijakan luar negeri mereka. Peranan kekuatan militer sendiri tidak hanya berguna untuk mempertahankan diri negara tersebut dari suatu negara yang ingin menyerang wilayahnya. Instrumen dari kekuatan militer ini juga berfungsi sebagai alat yang bisa digunakan sebagai pendukung untuk bisa menciptakan sebuah citra atau representasi dari suatu negara yang kemudian dapat digunakan sebagai penguat posisi negara tersebut di tatanan dunia nasional.

Adapun menurut Coplin dalam bukunya mengenai kondisi ekonomi domestik dari suatu negara bergantung kepada negara tersebut dalam mengatur bagaimana proses dari produksi barang dan jasa serta kemampuan negara itu dalam mengetahui kapasitas mereka untuk mengolah dua hal tersebut. Serta bagaimana kekayaan dari suatu negara bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya dan seberapa cepat pertumbuhan ekonomi mereka tumbuh (Coplin, 1992, hal. 115). Pentingnya faktor tersebut terletak pada kemakmuran dari suatu negara yang kemudian bisa membuktikan dan memperlihatkan bagaimana negara itu menjadi lebih unggul dari negara tetangganya maupun negara mitra dagangnya. Namun untuk seorang ahli agar bisa menentukan apabila suatu negara bisa dikatakan makmur atau tidak terletak pada *gross national product* atau GNP mereka.

GNP ini diciptakan oleh para ahli ekonomi untuk bisa membantu para peneliti dalam mengukur nilai seluruh barang dan jasa yang di buat dan proses dari suatu negara dalam periode satu tahun. Kemudian dari angka-angka GNP tersebut bisa diubah menjadi satu buah standar mata uang, yang kemudian dapat

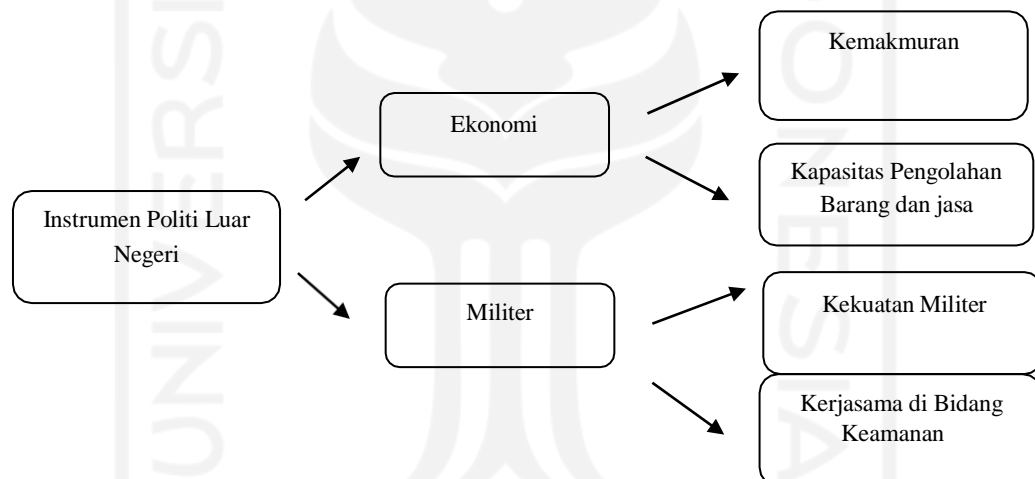
digunakan oleh para peneliti untuk bisa membandingkan kapabilitas ekonomi atau kekayaan suatu negara dengan negara lain (Coplin, 1992, hal. 115).

Berlanjut kepada kapasitas militer suatu negara. Hal ini merupakan salah satu instrumen politik internasional yang paling mutakhir dalam menunjukkan eksistensi dari suatu negara. Apabila kita melihat kekuatan militer Amerika dan Tiongkok misalnya. Kekuatan militer kedua negara itu tentunya memperlihatkan secara langsung kapasitas dan kekuatan dari suatu negara untuk bisa mempunyai peran penting di dunia internasional. Maka dari itu kekuatan militer bukanlah hal yang bisa menjadi bahan untuk disepelekan dalam menghitung kekuatan dan kapabilitas suatu negara. Terlebih lagi dalam menentukan sebuah kebijakan luar negeri, negara yang memiliki kekuatan militer lebih kuat tentunya kebijakannya akan lebih didengar dan dipatuhi oleh negara-negara lain. Kekuatan dari suatu negara juga tidak serta merta hanya dapat dinilai dari bagaimana kekuatan militer yang mereka miliki. Namun faktor lain seperti kapabilitas mereka untuk bisa menggunakan senjata, membuat senjata dan melatih angkatan bersenjata mereka bisa menjadikan suatu negara memiliki posisi lebih kuat daripada sebuah negara yang memiliki senjata memadai namun tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam menggunakan senjata tersebut (Coplin, 1992, hal. 124).

Maka dari itu kapabilitas ekonomi dan militer merupakan dua hal yang tidak bisa dipisah apabila seseorang ingin melihat kekuatan dan kapabilitas dari suatu negara. Tentunya tujuan dari melihat kekuatan suatu negara adalah juga untuk mengetahui bagaimana mereka menempatkan diri dan para negara lain di tatanan dunia internasional dengan demikian kita juga bisa melihat dan

membandingkan negara mana yang memiliki kekuatan untuk kebijakan luar negeri mereka agar lebih bisa didengar oleh negara lain. Namun pada penelitian kali ini penulis tidak akan bercerita terlalu banyak mengenai faktor kepentingan militer dari suatu negara dalam menentukan arah kebijakan luar negeri mereka. Mengingat kasus yang terjadi disini bersangkutan lebih berat ke arah ekonomi politik perdagangan, serta bagaimana komoditas ekspor sawit Indonesia yang dulunya menjadi salah satu komoditas yang paling diminati kemudian menjadi komoditas yang pendapatannya semakin berkurang.

Grafik 3.2. : Teori Ekonomi dan Militer Sebagai Instrumen Politik Luar Negeri.



3.2.1. Kapasitas Pengolahan Barang dan Jasa

Indonesia dengan segala keberagamannya memiliki potensi yang sangat memadai untuk sebuah negara berkembang. Dengan banyaknya sumber daya alam yang meliputi laut dan darat menjanjikan potensi pendapatan yang besar dari segi pariwisata maupun industri. Namun dengan adanya embargo minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ini kemudian melemahkan salah satu sektor

industri yang paling diminati ini. Dengan demikian para orang-orang yang sangat bergantung pada pendapatan dari minyak kelapa sawit ini kemudian mendapati keuntungan mereka berkurang.

Menurunnya pendapatan dari para petani dan pengusaha minyak kelapa sawit ini secara langsung berperan penting dalam pencatatan pendapatan nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui pada penjelasan di atas, pendapatan nasional mempunyai peran penting dalam suatu negara untuk memperlihatkan tingkat kemakmuran negara tersebut yang kemudian bisa digunakan sebagai alat untuk mendukung pembuatan kebijakan luar negeri. Namun dengan seiringnya penurunan pendapatan nasional ini kemudian semakin melemahkan juga posisi Indonesia sebagai pembuat kebijakan luar negeri. Dengan demikian Pemerintah harus cepat-cepat mengatasi pendapatan yang kian menurun dari para produsen salah satu komoditas terbaik Indonesia ini. Karena kembali lagi menurut Coplin sebuah negara dituntut untuk bisa menyalurkan kemakmuran mereka ke rakyat dan juga untuk bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Tingkat kemakmuran sebuah negara sebagai alat pendukung untuk memperlihatkan kemampuannya di dunia internasional, apabila kita berkaca kepada penjelasan tersebut dan menghubungkannya dengan kasus embargo CPO Indonesia oleh Uni Eropa ini maka kita dapat melihat dengan cukup rendahnya tingkat kemakmuran rakyat yang tersebar di wilayah-wilayah Indonesia. Membuat para pengambil keputusan harus berfikir apabila kita benar-benar ingin menghentikan ekspor sawit Indonesia ke Eropa sebagaimana yang telah direncanakan oleh Pemerintah maka pendapatan orang-orang yang terlibat pada industri kelapa sawit ini akan menurun. Namun dengan mencari pasar baru untuk

minyak kelapa sawit Indonesia masalah penurunan pendapatan tersebut bisa teratasi.

Kapasitas Indonesia untuk memproduksi barang dan jasa juga apabila dibandingkan dengan negara-negara Eropa tentunya tidak bisa dikatakan seimbang. Dengan latar belakang Indonesia yang memiliki sumber daya yang beragam namun tidak diimbangi oleh kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Ini juga membuat posisi Indonesia kian melemah dari Uni Eropa. Terlebih lagi dari pengolahan pada industri kelapa sawit di Indonesia ini masih belum semuanya merata dalam hal standar ramah lingkungan. Hal tersebut juga membatasi Indonesia dalam kemampuannya di pasar internasional. Karena tidak menutup kemungkinan adanya regulasi baru yang akan kian memperketat standar pengolahan dari penjualan kelapa sawit. Serta dengan demikian apabila pengusaha-pengusaha kelapa sawit Indonesia tidak segera berbenah maka pilihan-pilihan akan semakin sedikit untuk bisa mencapai keuntungan bagi pengusaha dan pemerintah dalam jangka panjang.

Uni Eropa dengan segala kemajuan teknologinya memiliki kelebihan tersendiri pada segi kekuatan posisinya di tatanan negara-negara dunia dan juga pada pasar internasional. Membuat Uni Eropa bisa menetapkan standar tinggi dalam aktivitas jual beli mereka. Kemampuan mengolah sumber daya alam menjadi bahan jual yang siap pakai serta dengan standar pengolahan yang lebih baik dari negara-negara berkembang membuat negara-negara terkemuka Eropa bisa mendapatkan pendapatan nasional yang tinggi. Seperti contohnya adalah Belanda sebagai salah satu anggota Uni Eropa. Belanda memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengolah bahan baku menjadi bahan siap pakai seperti; bahan

kimia, mesin, kendaraan bermotor, obat-obatan dan pesawat terbang. Belanda juga merupakan negara Uni Eropa yang memiliki volume impor terbanyak pada minyak kelapa sawit dari Indonesia. Maka dari itu tentunya Belanda memiliki pendapatan per kapita yang tinggi.

Pada tahun 2018 tercatat pendapatan per kapita Belanda adalah 52,863.774 USD (CEIC, 2021). Dapat terlihat dari pendapatan per kapita sebanyak itu membuat Belanda memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa memakmurkan para warganya. Terlebih lagi dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Belanda membuat tercapainya kemakmuran dan tumbuhnya perekonomian tentunya bisa lebih baik apabila dibandingkan dengan Indonesia misalnya. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat Uni Eropa dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri mereka.

Dengan demikian kita juga bisa melihat bagaimana Uni Eropa memiliki posisi yang kuat dalam permasalahan embargo minyak sawit dari Indonesia ini. Terlebih lagi berkat standar pengolahan industri mereka yang lebih tinggi dari Indonesia membuat mereka bisa menggunakan hal tersebut untuk memberatkan Indonesia dalam perkara ini.

Namun dengan tingginya sumber daya manusia Belanda ini tidak menutup kemungkinan bahwa adanya kelemahan yang dimiliki oleh Belanda dari faktor sumber daya alam yang apabila dibandingkan dengan Indonesia masih kurang. Serta dengan tingginya volume produksi barang yang dilakukan oleh Belanda maka tentunya dia memerlukan pasar internasional dan Indonesia juga merupakan salah satu mitra dagang Belanda yang terbesar. Indonesia kerap melakukan impor dari negara-negara Eropa salah satunya Belanda. Komoditas-komoditas yang

banyak di impor oleh Indonesia adalah mobil, pesawat terbang, mesin, dan obat-obatan. Potensi kehilangan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar Uni Eropa juga tentunya memiliki dampak yang signifikan bagi Uni Eropa.

Dengan dikurangnya dan terancamnya ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa untuk dihentikan secara total membuat Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk juga menghentikan pembelian beberapa komoditas dari Uni Eropa seperti contohnya pesawat terbang. Karena diperkirakan pada tahun 2034 tingkat penerbangan Indonesia akan meningkat tiga kali lipat yang membuat pesawat-pesawat dari Eropa yang biasanya dibeli oleh Indonesia kemudian akan terancam pasarnya (Hikam, 2019). Maka dari itu Indonesia sendiri dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia yang signifikan dari tahun ke tahun membuat Belanda dan Uni Eropa sendiri bisa kehilangan pasar yang memiliki potensi yang sangat tinggi.

Terlebih lagi orang-orang Indonesia yang memiliki sifat yang konsumtif membuat perputaran pembelian barang kemudian bisa lebih tinggi dari negara-negara dunia ketiga misalnya. Namun Pemerintah Indonesia juga tidak bisa berbangga karena Belanda juga merupakan pasar besar minyak sawit Indonesia yang apabila kehilangan bisa menyebabkan kerugian yang signifikan untuk Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan faktor ekonomi dan militer domestik sebuah negara tentu memperlihatkan bagaimana kondisi negara tersebut. Tidak terkecuali Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Kekuatan militer dan khususnya ekonomi mereka yang sangat berperan penting dalam membentuk citra di dunia internasional. Serta dengan kekuatan ekonomi memadai bisa membuat sebuah

negara terbilang makmur. Tapi tidak dengan apabila kemakmuran tersebut tidak bisa disebar merata ke seluruh rakyatnya.

Maka dari itu untuk Indonesia agar bisa mengambil keputusan dan menyusun strategi untuk menghadapi sengketa dagang yang berlangsung bersama Uni Eropa ini, Pemerintah harus memahami sekali atas apa kapabilitas yang dimiliki oleh negara-negara Uni Eropa dan juga kapabilitas Indonesia sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kapabilitas Indonesia sendiri masih berada di bawah negara-negara Uni Eropa dan dengan rencana untuk melakukan boikot komoditas yang dijual oleh Uni Eropa juga tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan permasalahan.

Sama seperti ketika Uni Eropa yang memboikot kelapa sawit Indonesia yang hanya karena proses pengolahannya tidak ramah lingkungan. Uni Eropa bisa saja melakukan hal tersebut karena mereka ingin melindungi komoditas minyak nabati olahan mereka agar bisa lebih bersaing di pasar mereka sendiri dan juga pasar internasional.

Kapasitas ekonomi yang dimiliki Indonesia juga sebenarnya bisa digunakan sebagai pembelaan dalam menghadapi kasus embargo minyak kelapa sawit ini. Melihat bahwa nantinya akan banyak industri serta orang-orang yang terdampak apabila volume ekspor CPO ini berkurang.

Dengan berkurangnya pendapatan dari minyak kelapa sawit itu tentunya berimbas langsung kepada pendapatan nasional Indonesia. Hal tersebut tentunya bisa dijadikan satu faktor pembelaan bagi Indonesia dalam menghadapi isu ini melewati perundingan-perundingan yang akan digelar bersama Uni Eropa nantinya. Pilihan lain bagi Indonesia adalah dengan ikut memboikot komoditas-

komoditas dagang dari Eropa yang dijual di Indonesia. Namun pilihan tersebut tentunya bisa juga menjadi kerugian tersendiri bagi Indonesia. Mengingat barang-barang yang dijual dari Uni Eropa ini memiliki kualitas yang bagus dan rata-rata memiliki usia pakai yang relatif lama.

Melihat dari faktor-faktor di atas, Uni Eropa dan Indonesia tentunya akan mengalami kerugian. Ketika embargo minyak sawit dari Indonesia akan dijalankan secara penuh maka akan berdampak kepada industri sawit Indonesia dan juga ketika Indonesia memilih untuk tidak membeli komoditas-komoditas dagang dari Uni Eropa maka mereka akan kehilangan salah satu pasar besarnya.

Namun melihat dari kapasitas ekonomi dari Uni Eropa tentunya mereka memiliki posisi yang diunggulkan pada saat ini. Mengingat mereka memiliki industri minyak nabati yang bisa mereka gunakan untuk menggantikan minyak kelapa sawit dari Indonesia. Sedangkan Indonesia sedang berada di posisi yang tidak terlalu kuat. Karena dengan kapasitas ekonomi dan militer serta sumber daya manusia yang masih belum bisa menyaingi. Terlebih lagi industri kelapa sawit yang dipermasalahkan ini masih memiliki standar produksi yang masih rendah karena sistem pengolahan lahannya yang masih banyak berdampak buruk kepada alam dan habitat sekitar.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan standar untuk industri kelapa sawit agar memiliki produksi yang berkelanjutan serta ramah bagi lingkungan sekitar dengan menerbitkan ISPO atau *Indonesia Sustainable Palm Oil*. Namun sayangnya masih banyak produsen-produsen minyak kelapa sawit yang masih belum mengikuti peraturan ini. Pemerintah juga mengalami kesusahan untuk bisa memonitor kinerja industri kelapa sawit karena masih banyak produsen yang

belum memiliki izin resmi yang membuat keberadaan lokasi mereka sulit untuk diketahui.

3.2.2. Posisi Kelapa Sawit di Perdagangan Luar Negeri Indonesia serta Perannya Dalam Perekonomian Domestik

Industri kelapa sawit sendiri tentunya menjadi salah satu komoditas yang menguntungkan dari Indonesia. Mengingat besarnya produksi yang dilakukan di Sumatera dan Kalimantan serta kegiatan ekspor olahannya yang memiliki volume tinggi. Posisi komoditas kelapa sawit bersama lemak dan minyak hewani/nabati, menduduki peringkat pertama dalam urutan komoditas ekspor Indonesia. Mengungguli bahan bakar mineral, besi dan baja, serta mesin/peralatan listrik (Portal Statistik Perdagangan, 2021).

Maka dari itu pengaruh kelapa sawit sendiri sangat besar dalam bidang komoditas ekspor Indonesia, melihat dari nilai ekspornya yang mengalahkan bahan bakar mineral. Tingginya permintaan minyak kelapa sawit ini tentunya karena harganya yang relatif terjangkau serta dapat diolah kembali menjadi produk akhir yang bernilai jual tinggi.

Table 3.3. : Komoditas Ekspor non-migas Indonesia (USD Juta)

No.	Uraian	2018	2019	Total
1	Lemak & Minyak Hewan/Nabati	20. 348,1	17. 634,8	37. 982,9
2	Bahan Bakar Mineral	24. 610,2	22, 316,2	46. 926,4
3	Besi dan Baja	5. 756,5	7. 387,4	13. 143,9
4	Mesin/Peralatan Listrik	8. 855,0	9, 012,2	17. 867,2
5	Permata dan Perhiasan	5, 603,3	6. 619,8	12. 223,1
6	Kendaraan dan Bagiannya	7, 552,1	8. 188,0	15. 740,1

Sumber : (Portal Statistik Perdagangan, 2021).

Peran industri kelapa sawit tentunya sangat krusial dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Terlebih lagi pengolahannya yang tidak memakan biaya serta sumber daya manusia yang begitu besar membuat industri ini bisa berkembang dengan pesat di Indonesia khususnya.

Dengan pertumbuhan industri minyak kelapa sawit di Tanah air yang semakin meluas, tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakat mulai dari yang berpendidikan menengah hingga orang-orang yang sudah melewati jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tercatat dalam sektor ketahanan energi, penerapan kebijakan untuk mengolah kelapa sawit menjadi biodiesel B-20 membuat Pemerintah Indonesia menghemat devisa sebesar kurang lebih 30 triliun Rupiah. Industri ini juga banyak menyerap tenaga kerja, sebanyak 4,2 tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Sementara penyerapan tenaga kerja pada sektor petani swadaya mampu menyerap 4,6 juta individu. (Tempo.co, 2018).

3.2.3. Kerja sama Militer Indonesia dan Uni Eropa

Keputusan Indonesia untuk memfokuskan penjualannya ke pasar non-Uni Eropa adalah untuk meningkatkan kembali produktifitas dari industri kelapa sawit yang sempat menurun. Hal tersebut tentunya dapat menambah pendapatan negara yang kemudian bisa menjadi investasi kepada sektor militer Indonesia. Namun pada studi kasus ini, tidak ada data yang menampilkan adanya peran militer dalam isu embargo minyak kelapa sawit ini.

Dalam sebuah hubungan antar negara tentunya tidak selalu membahas tentang bagaimana satu negara bisa diuntungkan oleh negara lain melalui

kegiatan dagang yang mereka lakukan. Isu keamanan juga merupakan hal yang penting untuk dibahas dalam hubungan antar negara. Pentingnya isu keamanan ini tentunya sangat berpengaruh kepada berjalannya kegiatan antar negara.

Hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa tidak semata-mata hanya pada hubungan dagang komoditas jual beli saja. Pemerintah Indonesia sendiri telah berinisiatif mengajak Uni Eropa untuk bisa bergabung di *Our Eyes Initiatives*, adalah sebuah kerja sama antar negara yang bergerak dipertukaran informasi yang mempunyai tujuan utama dalam memerangi terorisme dan radikalisme. *Our Eyes Initiatives* pertama kali beranggotakan enam negara ASEAN yaitu; Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura (KEMENHAN Indonesia, 2018).

Pentingnya diciptakan kerja sama ini menurut Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu berpendapat, bahwa kedepannya ancaman tidak akan lagi bersifat perang konvensional secara terbuka antar negara. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama antar negara atau kawasan, agar terwujudnya keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan untuk semua penduduknya. Serta Ryamizard juga berujar bahwa apabila Uni Eropa sebelumnya telah bergabung dikerja sama ini, kemungkinan dari serangan grup radikal *Islamic State* yang telah menyerang wilayah Eropa akan bisa dicegah (KEMENHAN Indonesia, 2018).

Dengan adanya kerja sama dibidang militer dan keamanan di dalam hubungan suatu negara tentunya akan berdampak juga pada sektor ekonomi. Karena dengan terjaminnya keamanan membuat kinerja perdagangan antar negara akan tetap stabil maka dari itu kedua negara akan terus mendapatkan keuntungan

dari hubungan ekonomi ini. Namun apabila keamanan tidak lagi terjamin diantara hubungan kedua negara, akan membuat kegiatan pada sektor lain akan terganggu.

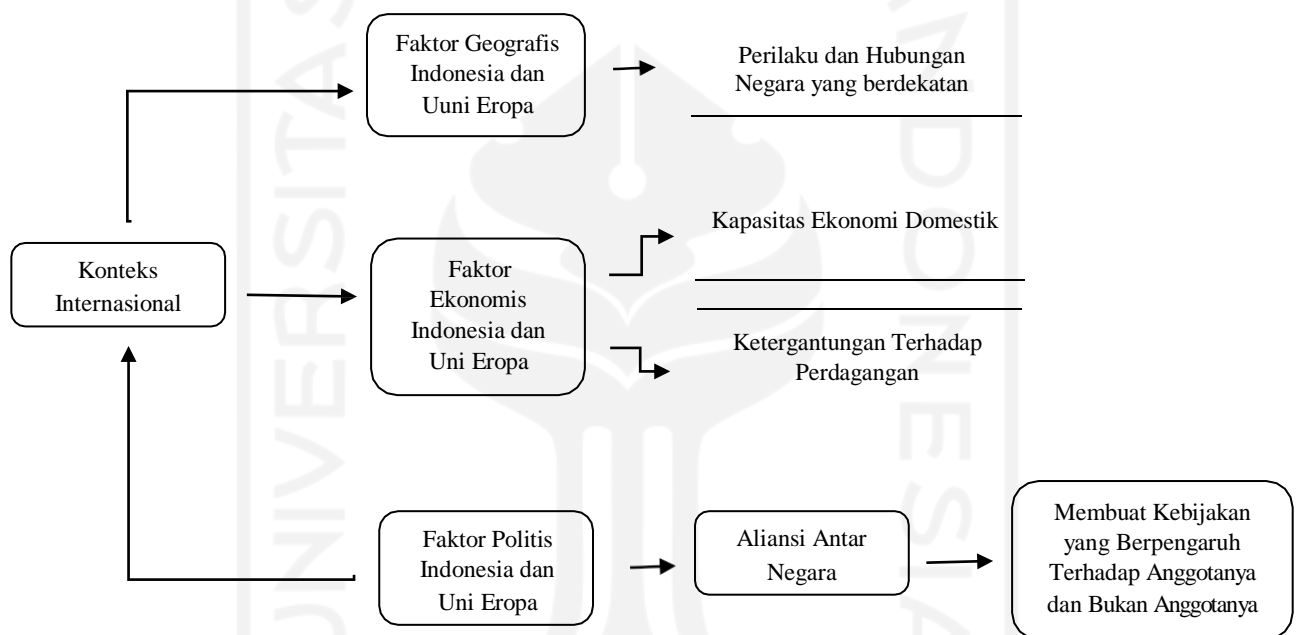
3.3. Konteks Internasional

Dalam menentukan dan merumuskan suatu kebijakan luar negeri, tentunya sebuah Pemerintah harusnya memahami tentang konteks internasional yang sedang terjadi. Pentingnya pemahaman akan konteks internasional ini adalah untuk bisa mengetahui bagaimana permasalahan atau isu tersebut bisa terjadi dan bagaimana perilaku negara atau organisasi yang terdampak pada sebuah masalah kemudian cara mereka mengatasinya. Hal-hal tersebut kemudian tentunya bisa digunakan oleh sebuah negara untuk bisa menetapkan sebuah kebijakan luar negeri yang tepat untuk bisa menghadapi isu yang sedang terjadi.

Coplin dalam bukunya berpendapat bahwa ada tiga buah faktor yang memegang peranan penting dalam hal konteks internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dari suatu negara yaitu faktor geografis, ekonomis, dan politis. Faktor geografis lebih menjelaskan tentang bagaimana negara-negara yang berdekatan cenderung memiliki hubungan yang baik, entah itu hubungan dagang, perilaku ketika bersama dalam sebuah organisasi internasional, atau kekompakan dalam memilih suara dalam Perserikatan Bangsa- Bangsa. Faktor ekonomis banyak menjelaskan tentang kapasitas ekonomi domestik dan ketergantungan terhadap perdagangan yang kemudian dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor politis kemudian menjelaskan tentang bagaimana negara-negara yang memiliki aliansi atau afiliasi

tertentu yang kemudian membuat sebuah kebijakan yang bisa berdampak besar kepada negara anggotanya dan juga bukan anggotanya (Coplin, 1992, hal. 167).

Grafik 3.3.: Faktor-Faktor Dari Konteks Internasional



3.3.1. Faktor Geografis

Pemerintah Indonesia dalam hal ini sedang dihadapkan oleh permasalahan embargo minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan menerbitkan RED II. Hal tersebut kemudian memicu dampak yang signifikan terhadap Indonesia. Embargo ini sendiri bertujuan untuk menghentikan atau mengurangi dampak dari produksi minyak kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan. Uni Eropa sendiri merencanakan untuk mengganti komoditas olahan minyak kelapa sawit yang biasa mereka impor dari Indonesia dan Malaysia

dengan minyak nabati atau minyak biji bunga matahari yang diproduksi dan dikelola di Eropa. Dengan adanya alternatif bagi Uni Eropa atas minyak kelapa sawit tersebut, mereka berharap akan bisa mengurangi dampak yang dihasilkan dari pengolahan minyak kelapa sawit terhadap lingkungan.

Pada bulan April 2019, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad untuk kemudian membahas langkah apa yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam merespons embargo minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa ini. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan bersama untuk menyatakan keberatan atas keputusan Uni Eropa tersebut dan kemudian mengirimkan surat yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad ke Uni Eropa (Mangkuto, 2019).

Dalam konteks geopolitik Keputusan Uni Eropa tersebut tentunya memberi dampak signifikan terhadap Indonesia dan juga Malaysia sebagai dua negara yang menghasilkan minyak kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan mereka.

Dalam hal ini tentunya Indonesia dan Malaysia memiliki rencana khusus dalam pengembangan minyak kelapa sawit yang berjangka panjang yaitu ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) dan MSPO (*Malaysia Sustainable Palm Oil*). Walaupun kedua standarisasi ini memiliki perbedaan masing-masing. ISPO mempunyai tujuan utama untuk menaikkan standar dari pengolahan kelapa sawit Indonesia yang kemudian diharapkan bisa membuat pengolahan minyak kelapa sawit bisa menjadi lebih ramah lingkungan dan bisa meningkatkan kesejahteraan para petani sawit (Suling, 2016). Sedangkan MSPO memiliki tujuan untuk bisa memfasilitasi para pengusaha-pengusaha kecil yang

bergerak di bidang penanaman dan pengolahan kelapa sawit. Entah itu dimudahkan dalam pembuatan izin usaha ataupun dibantu dalam pendidikan untuk mengelola kebun sawit agar bisa menjadi lebih ramah lingkungan (Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), 2013).

Kedua standarisasi tersebut merupakan upaya Indonesia dan Malaysia dalam membuat minyak kelapa sawit menjadi komoditas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terlebih lagi upaya Indonesia dan Malaysia ini merupakan kerja sama geografis seperti yang disebutkan oleh Coplin. Dengan memiliki letak geografis yang berdekatan serta kepentingan untuk melanjutkan industri sawit maka terciptalah dua standarisasi ini. Kedua standarisasi tersebut juga merupakan respons mereka atas tuduhan Uni Eropa terhadap pengolahan minyak kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan.

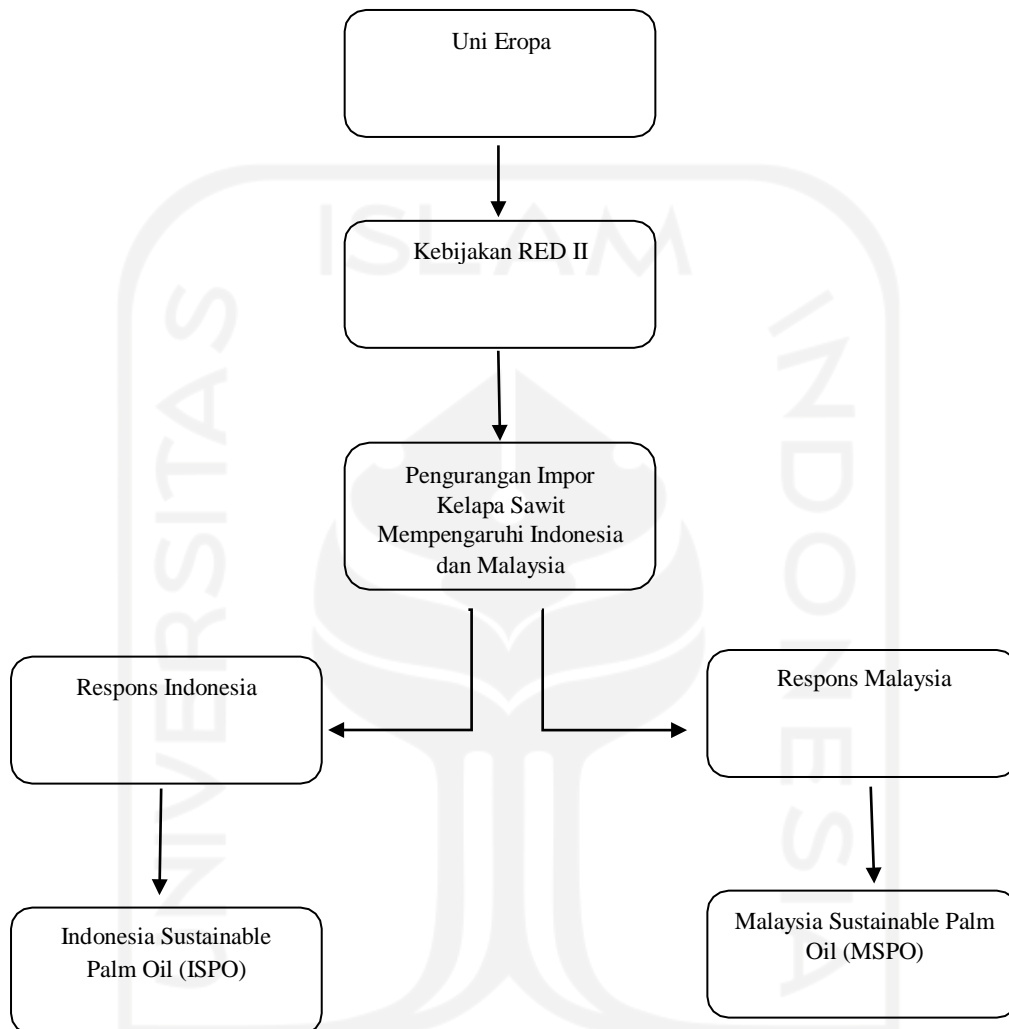
Negara-negara Uni Eropa juga melakukan hal serupa. Namun dengan konteks untuk melindungi alam yang semakin rusak karena adanya produksi minyak kelapa sawit yang mereka nilai tidak ramah lingkungan. Selain itu tingginya tingkat polusi yang disebabkan dari penggunaan bahan bakar bio diesel olahan minyak kelapa sawit ini juga membuat negara-negara Uni Eropa sepakat untuk melakukan embargo minyak kelapa sawit dan volume ekspor ke Uni Eropa dari Indonesia sudah mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Peningkatan standarisasi untuk polusi yang dihasilkan oleh kendaraan dan juga sumber dari bahan bakar untuk konsumsi kendaraan harus mencapai 32% diatur oleh Uni Eropa dalam RED II sebagai penyempurnaan dan revisi dari RED. RED II juga mengatur tentang bagaimana penggunaan lahan pertanian untuk bisa

menjadi lebih efisien (The European Commission's science and knowledge service, 2019).

Dengan diberlakukannya RED II oleh Uni Eropa membuat volume ekspor sawit Indonesia mengalami penurunan dan petani-petani minyak kelapa sawit tidak bisa mendapatkan penghasilan dari perusahaan pengolahan minyak sawit yang biasanya membeli dari petani, karena produksi dari pabrik minyak sawit yang terganggu akibat dari penurunan permintaan dari negara-negara Uni Eropa. Disisi lain anggota-anggota Uni Eropa sedang mengembangkan sumber bahan bakar ramah lingkungan yang akan menggantikan posisi minyak kelapa sawit yaitu minyak biji bunga matahari atau minyak nabati. Penggunaan minyak nabati ini diharapkan oleh Uni Eropa untuk bisa menggantikan minyak kelapa sawit karena produksinya yang tidak mengharuskan mereka untuk melakukan impor dari negara-negara penghasil sawit yang letaknya jauh dari Eropa sehingga bisa menghasilkan biaya yang lebih murah namun dengan output dan kuantitas lebih banyak dari pada harus impor minyak sawit.

Negara-negara Uni Eropa sendiri dalam hal ini mempunyai kepentingan untuk melindungi komoditas minyak nabati produksi mereka yang tentunya masih belum bisa menyaingi minyak kelapa sawit. Maka dari itu dengan pengurangan volume impor minyak kelapa sawit dari Indonesia, negara-negara Uni Eropa berharap untuk bisa fokus dalam penumbuhan dan perkembangan dari sektor minyak nabati mereka. Negara seperti Romania yang menjadi pemasok utama dalam kebutuhan Uni Eropa dalam olahan minyak bunga matahari. Pada tahun 2019 tercatat total berat dari panen bunga matahari sebanyak 2.07 juta ton (Marica, 2021).

Grafik 3.4. : Kerjasama Geografis Antara Negara-Negara Uni Eropa serta Kerjasama Geografis Indonesia dan Malaysia dalam Merespons RED II.



3.3.2. Faktor Ekonomi

Pengaruh faktor perspektif ekonomis pada pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan tentunya kita harus mengerti terlebih dahulu dari bagaimana kapasitas sebuah negara dalam mengelola perekonomiannya. Bagaimana negara tersebut bisa menghasilkan barang dan mengubah komoditas tersebut menjadi bahan jual yang menghasilkan pendapatan nasional. Tidak hanya itu, sebuah negara juga tentunya memiliki ketergantungan terhadap negara lain dalam hal perdagangan.

sebab dari itu adalah; tidak semua negara mempunyai kapabilitas atau sumber daya yang sama untuk bisa membuat serta mengolah suatu barang untuk dikonsumsi atau dijual.

Keputusan Uni Eropa untuk melakukan embargo minyak kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia bukan semata-mata karena mereka merasa bahwa komoditas tersebut tidak ramah lingkungan. Dengan adanya produksi minyak nabati oleh negara-negara Uni Eropa tentunya itu menimbulkan pertanyaan. Minyak kelapa sawit sendiri sudah menjadi salah satu komoditas yang paling banyak diekspor oleh Indonesia tidak hanya ke Eropa, tentunya ke negara-negara lain seperti Tiongkok dan India. Maka dari itu dengan dibuatnya embargo ini tentunya tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perbaikan lingkungan yang ada karena pabrik minyak sawit akan terus beroperasi dan Indonesia akan terus mengirimkan minyak sawitnya ke luar negeri.

Tentunya ada kepentingan tersendiri yang dimiliki oleh Uni Eropa dalam dibuatnya embargo ini, yaitu untuk mempertahankan operasi pengolahan minyak nabati yang mereka kembangkan secara domestik. Dengan berkurangnya volume impor minyak kelapa sawit dari luar negeri membuat industri pengolah minyak nabati negara-negara Uni Eropa bisa memfokuskan pasar mereka dan tidak khawatir terganggu dengan adanya minyak kelapa sawit.

Ancaman Pemerintah Indonesia untuk melakukan embargo barang-barang dari Eropa juga merupakan pilihan yang kurang bijak. Mengingat Indonesia memiliki ketergantungan atas barang-barang yang dibuat di Eropa yang notabene memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada barang-barang yang diimpor dari Tiongkok misalnya. Terlebih lagi, apabila pasar Tiongkok sedang

tidak dalam kondisi baik akibat pandemi yang melanda, membuat Indonesia harus kembali mengandalkan pasar Eropa untuk melakukan impor komoditas masker misalnya, yang pasar Tiongkok masih belum memiliki jumlah yang banyak untuk bisa dijual ke Indonesia (Tri, 2020).

Hal tersebut juga seharusnya menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam memutuskan kebijakan untuk menghadapi embargo ini. Kondisi ekonomi domestik Indonesia juga pastinya mengalami dampak yang disebabkan oleh embargo kelapa sawit ini, terutama pada petani-petani skala kecil kelapa sawit. Kebanyakan petani-petani tersebut tidak bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan kelapa sawit karena pabrik pengolahannya tidak menetapkan target produksi sebanyak biasanya.

Kebijakan ekspansi pasar ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke pasar non-Uni Eropa ini bertujuan untuk memperkuat diplomasi perdagangan dan mengalihkan lebih banyak stok CPO ke pasar-pasar yang sudah ada.

Tentunya Indonesia bukan menjadi produsen minyak kelapa sawit yang berdiri tunggal. Adanya negara-negara lain yang ikut melihat minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang menguntungkan juga membuat mereka kemudian ikut berjibaku ke dalam industri ini. Hadirnya negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria sebagai negara pesaing produksi minyak kelapa sawit Indonesia. Namun, dengan adanya negara-negara tersebut yang juga memproduksi minyak kelapa sawit, tidak bisa mengimbangi produksi dari Indonesia yang volumenya jauh lebih besar dari negara-negara kompetitornya.

Table 3.4. : Negara-negara produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia

Dalam juta ton		
No	Negara	Total Produksi
1.	Indonesia	40,57
2.	Malaysia	19,52
3.	Thailand	2,78
4.	Kolombia	1,63
5.	Nigeria	1,05

Sumber: (Our World in Data, 2020).

Dari semua produksi minyak kelapa sawit tersebut, tentunya tidak semua akan dipakai untuk keperluan domestik dari negara produsennya. Sebagian besar dari hasil produksi itu akan dijual ke masing-masing mitra dagang negara tersebut. Minyak sawit yang dibeli tersebut akan diolah menjadi berbagai macam bahan siap jual mulai dari minyak goreng hingga sabun mandi. Kebutuhan minyak sawit yang bervolume besar ini merupakan hasil dari beragamnya olahan yang bisa diproduksi dari minyak kelapa sawit itu sendiri. Adapun negara-negara yang melakukan import sawit dengan jumlah banyak adalah seperti; India, Pakistan, Spanyol, Italia, dan Amerika Serikat.

Table 3.5. : Negara-negara pengimpor minyak kelapa sawit terbesar dunia.

Dalam juta US\$		
No	Negara	Total Impor
1.	India	5. 408,89
2.	Pakistan	1. 752,14
3.	Spanyol	1. 168,31

Dalam juta US\$		
No	Negara	Total Impor
4.	Italia	1. 040.06
5.	Amerika Serikat	1. 014,3

Sumber: (Statista, 2021).

3.3.3. Faktor Politik

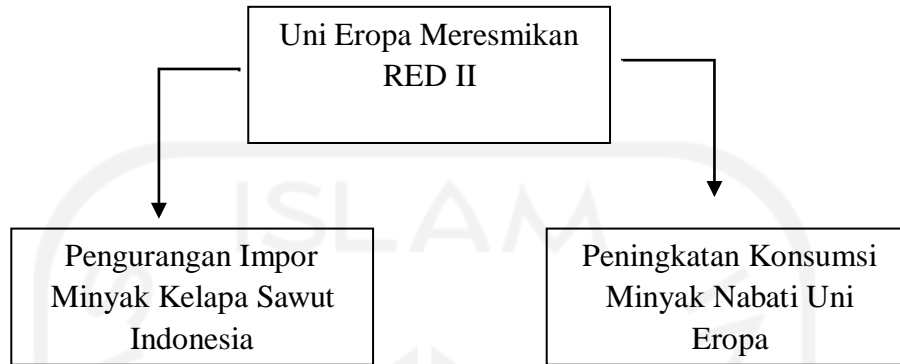
Beralih ke perspektif faktor politik. Dengan aktifnya RED II yang dibuat oleh Uni Eropa bisa memberi dampak yang signifikan terhadap negara-negara Eropa maupun Indonesia. Produksi minyak nabati Eropa tentunya sangat menguntungkan bagi mereka. Dengan standarisasi pengolahan yang baik tentunya menjadi faktor utama dalam pertimbangan mereka untuk tidak lagi menggunakan minyak kelapa sawit. Terlebih lagi dengan begitu mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Namun dampak buruk bagi lingkungan juga menjadi ancaman khusus bahkan untuk pengolahan minyak nabati ini. Mengingat lahan nabati ini membutuhkan lahan yang lebih besar dari kelapa sawit untuk bisa mengimbangi produksinya. Sedangkan lahan-lahan di Eropa tidak memiliki besar yang sama dari Indonesia misalnya. Dampak buruk lainnya adalah bahwa pengolahan minyak nabati ini tidak akan menjadi efisien mengingat untuk penanamannya saja membutuhkan lahan yang besar.

Indonesia juga tentunya mengalami dampak yang tidak baik dengan adanya RED II ini. Dengan berkurangnya volume ekspor ke Eropa membuat pendapatan Indonesia dari sektor sawit menurun secara signifikan. Maka dari itu Pemerintah merespons dengan menggunakan cadangan minyak sawit untuk diolah menjadi biodiesel dan dipasarkan dalam negeri dalam upaya mereka agar industri

kelapa sawit terus berjalan. Regulasi yang membutuhkan pengolahan kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan juga membuat produsen-produsen minyak kelapa sawit Indonesia terus meningkatkan standar mereka. Sehingga apabila dalam waktu yang akan datang, ada pasar yang membutuhkan produksi sawit yang ramah lingkungan, tentunya tidak akan menjadi permasalahan lagi bagi Indonesia. Namun yang pasti dengan terbitnya RED II tidak bisa secara langsung memberi dampak yang signifikan terhadap kelestarian hutan. Mengingat masih ada mitra dagang Indonesia yang masih membutuhkan minyak kelapa sawit sehingga membuat produksi terus berlanjut.

Maka dari itu melihat dari perspektif faktor politis dapat diketahui bahwa dibuatnya sebuah kebijakan internasional oleh kumpulan-kumpulan negara yang membentuk satu buah organisasi bisa menciptakan pengaruh kepada para anggotanya dan juga kepada yang bukan anggota perkumpulan tersebut. Melihat kasus embargo minyak kelapa sawit dari terbitnya standarisasi RED II yang dibuat oleh Uni Eropa tentunya memiliki dampak yang besar bagi kedua belah pihak yaitu Uni Eropa dan Indonesia. Uni Eropa dalam hal ini mengalami dampak yang menguntungkan mereka dengan berkurangnya volume minyak kelapa sawit di pasar energi mereka, membuat mereka bisa lebih leluasa untuk memasarkan minyak nabati hasil olahan mereka sendiri di pasar mereka. Sedangkan untuk Indonesia tentunya mengalami kerugian dengan kehilangan salah satu pasar terbesar untuk minyak kelapa sawit mereka. Kehilangan pasar tersebut juga memberi imbas kepada petani-petani kecil yang mengandalkan pemasukan mereka dari menanam sawit dan menjualnya ke pabrik.

Grafik 3.5. : Kebijakan RED II yang Mempengaruhi Uni Eropa dan Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Riset ini telah berupaya untuk menjawab rumusan masalah “Mengapa Indonesia memutuskan untuk mencari pasar baru di sektor ekspor kelapa sawit setelah terbitnya kebijakan pengurangan impor oleh Uni Eropa?” Melalui perspektif dari teori *Decision Making* oleh William D. Coplin. Pada Bab pertama telah menjelaskan tentang bagaimana Indonesia sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia dihadapkan dengan isu embargo yang dilakukan oleh Uni Eropa atas dasar bahan bakar biodiesel yang sudah dinilai semakin tidak ramah lingkungan, serta adanya pilihan komoditas minyak nabati bagi Uni Eropa yang mereka nilai lebih ramah lingkungan untuk bisa menggantikan posisi minyak kelapa sawit di pasar energi Uni Eropa.

Bab kedua telah menguraikan hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa secara umum, mengenai volume kegiatan ekspor dan impor komoditas MIGAS dan non-MIGAS, serta komoditas apa saja yang memiliki volume ekspor dan impor terbanyak dari Uni Eropa dan Indonesia. Pada bab ini juga membahas tentang pemberlakuan RED II oleh Uni Eropa yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Indonesia.

Bab ketiga telah menganalisis tentang faktor apa saja yang mempengaruhi strategi Indonesia dalam menghadapi isu embargo ini dengan menggunakan teori *Decision Making* oleh William D. Coplin. Dimulai dari konteks politik domestik yang memiliki beberapa faktor penting yang mempengaruhi seperti partai, massa, birokrasi, dan kepentingan, yang keempat faktor tersebut memiliki kesamaan

untuk menyuarakan kepentingan mereka agar bisa mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh *decision maker*. Berlanjut kepada faktor ekonomi dan militer yang menjelaskan bagaimana kedua hal tersebut berhubungan dalam menjaga stabilitas jalannya kegiatan ekonomi antar negara. Serta menjelaskan tentang posisi kelapa sawit di pasar internasional serta perannya dalam perekonomian domestik Indonesia. Pada sub bab ini juga memaparkan tentang usaha Pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan pengolahan minyak kelapa sawit yang belum ramah lingkungan. Beralih ke sub bab konteks internasional, yang memaparkan tentang adanya pola perilaku negara yang serupa di dalam sebuah organisasi internasional ataupun kerjasama. Seperti yang terjadi pada negara-negara Uni Eropa yang sepakat untuk mengurangi impor minyak kelapa sawit serta Indonesia dan Malaysia yang bersama-sama keberatan akibat adanya pengurangan impor tersebut. Pada sub bab ini juga menjelaskan tentang bagaimana kapasitas ekonomi domestik bisa mempengaruhi Uni Eropa dan Indonesia pada studi kasus embargo ini.

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini maka kita harus melihat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam memutuskan untuk mencari pasar baru untuk komoditas minyak kelapa sawitnya. Melihat dari keputusan Uni Eropa untuk mengurangi impor minyak kelapa sawit dari Indonesia, atas dasar pengolahan yang menurut mereka masih belum memenuhi standar ramah lingkungan. Tentu hal tersebut juga didasari oleh kepentingan Uni Eropa untuk melindungi komoditas minyak nabati mereka yang masih belum bisa bersaing dengan minyak kelapa sawit yang lebih murah serta memiliki kegunaan yang lebih beragam.

Melihat dari faktor ekonomi domestik Indonesia khususnya produksi minyak kelapa sawit yang pada saat ini masih memiliki volume produksi yang cukup tinggi membuat Indonesia harus melihat pasar baru untuk melakukan ekspor. Tidak lupa juga adanya kelompok kepentingan yang memiliki akses ke ruang pembuat kebijakan membuat urgensi untuk melihat negara-negara yang memiliki potensi besar untuk dijadikan rekan dagang minyak kelapa sawit Indonesia. Serta adanya kelompok masyarakat yang mendesak Pemerintah untuk lebih memaksimalkan produktifitas dari lahan-lahan sawit yang sudah ada dan tidak memperluas area plantasi demi keberlangsungan habitat flora dan fauna endemik.

Maka dari itu keputusan Pemerintah Indonesia untuk mencari pasar baru pasca terbitnya isu embargo minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa ini adalah karena adanya dorongan dari perekonomian domestik Indonesia yang memiliki ketergantungan terhadap produksi minyak kelapa sawit beserta pemasukan yang didapatkan dari hasil kegiatan ekspor CPO ke negara-negara mitra dagang Indonesia. Serta adanya tekanan dari Uni Eropa yang menginginkan pengolahan minyak kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan, membuat Indonesia merasa pasar Eropa tidak lagi menguntungkan untuk jangka panjang.

Tabel 4.1. : Aplikasi Teori Decision Making Terhadap Studi Kasus Embargo CPO Indonesia.

No.	Variabel dalam teori (William D. Coplin 1992).	Aplikasi dalam studi kasus
1	<p>Politik Domestik</p> <p><i>“Rangkaian konsep kedua terdiri atas empat kategori policy influencers yang mirip dengan keempat tipe seperti yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Elit politik yang meliputi para pejabat terpilih serta para anggota partai, elit administratif atau elit birokratis, elit kepentingan, serta elit komunikasi.”</i> (Coplin, 1992, Hal 81).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Birokat: Produsen besar minyak kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI, memiliki koneksi yang kuat di pemerintahan untuk menyampaikan pentingnya pasar baru guna keberlangsungan ekspor minyak sawit mereka. • Partai: Memperlihatkan hadirnya kader-kader partai yang mendukung RUU Perkelapasawitan mewakili kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat dan para produsen minyak kelapa sawit. • Kepentingan: Produsen minyak kelapa sawit mendekati para pembuat kebijakan untuk bisa memanfaatkan produksi mereka agar bisa digunakan secara domestik dan mencari peluang untuk pasar ekspor non-Uni Eropa. • Massa: Terdapat kepentingan dari masyarakat luas agar Pemerintah tidak kembali membuka lahan plantasi sawit baru. Hal ini dikarenakan pembukaan lahan baru ini bisa berakibat menipisnya luas hutan yang menjadi habitat flora dan fauna endemik dari suatu daerah, yang menjadi permasalahan awal embargo CPO Indonesia.
2	<p>Konteks Internasional</p> <p><i>“Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis.”</i> (Coplin, 1992, Hal 167).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geografis: Kerjasama Uni Eropa dalam memberlakukan kebijakan RED II yang mempengaruhi Indonesia. Serta Indonesia dan Malaysia yang keberatan dengan diberlakukannya kebijakan RED II. • Ekonomis: Indonesia yang mengancam untuk membalas embargo kepada Uni Eropa. hal itu akan berpengaruh kepada perekonomian Indonesia, yang memiliki ketergantungan dibebberapa bidang seperti permesinan dan peralatan industri yang masih didatangkan dari Eropa. • Politis: Keputusan Uni Eropa untuk melakukan embargo minyak kelapa sawit untuk melindungi komoditas minyak nabati mereka yang masih belum bisa bersaing dengan CPO.
3	<p>Ekonomi & Militer</p> <p><i>“Seakan-akan lingkungan dalam negeri tidak cukup rumit oleh adanya tuntutan dan persaingan di antara policy influencer, pengambil</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Ekonomi: kapasitas ekonomi dari Uni Eropa yang lebih baik dari Indonesia. Dengan kapasitas pengolahan ekonomi yang lebih baik membuat Uni Eropa memiliki kemampuan lebih untuk bisa memasarkan

No.	Variabel dalam teori (William D. Coplin 1992).	Aplikasi dalam studi kasus
	<p>keputusan politik luar negeri harus pula mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika ia menyusun politik luar negeri. Dia harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi ekonomi dan militer.” (Coplin, 1992, Hal 110).</p>	<p>minyak nabati produksi mereka sendiri ke pasar domestik Eropa. Sedangkan Indonesia memiliki kapasitas ekonomi yang tidak sebaik Uni Eropa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Militer: Indonesia yang mengajak Uni Eropa untuk bergabung di <i>Our Eyes Initiatives</i> yang berupaya untuk bisa meningkatkan kewaspadaan dan keamanan terhadap ancaman domestik maupun antar negara.

B. Rekomendasi

Untuk para peneliti yang ingin mengkaji isu mengenai perdagangan Indonesia secara spesifik mengenai kelapa sawit, saya sangat merekomendasikan untuk melihat tentang *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai respons Indonesia mengenai industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta pengaruhnya terhadap komoditas perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Kehadiran ISPO ini tentunya merupakan jawaban Pemerintah Indonesia dalam menghadapi permintaan pasar minyak kelapa sawit dunia yang mulai memperhatikan tentang permasalahan pengolahan industri kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan dan juga tidak efisien dalam penggunaan lahan plantasi nya. Karena pada sebelum terbitnya ISPO ini, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan produksi minyak kelapa sawit yang cara pengolahannya masih belum memenuhi standar ramah lingkungan oleh Uni Eropa. Sehingga membuat Uni Eropa pelan-pelan mulai meninggalkan pasar minyak kelapa sawit Indonesia. Serta juga pada waktu yang akan datang, pasar minyak kelapa sawit dunia akan mulai bergerak menuju pengolahan minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan. Hal tersebut tentunya akan menjadi perhatian khusus bagi Indonesia yang masih mengandalkan CPO sebagai salah

satu komoditas ekspor yang memiliki volume penghasilan tinggi terhadap pemasukan negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Export dan Import*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/exim/>
- Badan Pusat Statistik. (2021, Juli 21). *Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2020*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1026/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2020.html>
- BBC News. (2019, Maret 19). *Kelapa sawit, ancaman perang dagang RI-Uni Eropa dan enam hal lainnya*. Diambil kembali dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>
- CEIC. (2021, Juli 19). *Belanda PDB Per Kapita*. Diambil kembali dari CEIC: <https://www.ceicdata.com/id/indicator/netherlands/gdp-per-capita>
- Coplin, W. D. (1992, March 18). *Pengantar Politik internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV. Sinar Baru. Diambil kembali dari Repository UMY: <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/12758/E.%20BA%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. (2017). *Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests*. Brussels: European Parliament.
- Coplin, W. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Deforestasi, N. (2019, April 12). *PDIP dan Golkar: Pelindung Korporasi Sawit*. Diambil kembali dari Kompasiana: https://www.kompasiana.com/noldeforestasi/5cb06502cc52832902447795/pdip-dan-golkar-pelindung-korporasi-sawit?page=2&page_images=1
- European Commission. (2021). *European Union, Trade in goods with Indonesia*. Directorate General for Trade.
- Eurostat. (2021). *Eurostat statistics explained*. Diambil kembali dari Main goods in extra-EU imports: Main goods in extra-EU imports
- Fauzia, M. (2019, November 28). *Jokowi: Kalau Sawit Didiskriminasi Eropa, Kita Pakai Sendiri*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/28/18404661/jokowi-kalau-sawit-didiskriminasi-eropa-kita-pakai-sendiri>
- GAPKI. (2019, Maret 19). *GAPKI : Pemerintah harus bisa cari pasar baru potensial seperti Timur Tengah dan Afrika*. Diambil kembali dari GAPKI: <https://gapki.id/news/14519/gapki-pemerintah-harus-bisa-cari-pasar-baru-potensial-seperti-timur-tengah-afrika>

- Gardner, S. (2019, January 23). *Palm Oil's Loss May Be U.S. Soybean Gain in EU Biofuel Rule (1)*. Diambil kembali dari Blommberg Environment: <https://news.bloombergenvironment.com/environment-and-energy/palm-oils-loss-may-be-u-s-soybean-gain-in-eu-biofuel-rule-1>
- Gunawan, I. (t.thn.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang.
- Hadiwijaya, V. F. (2018). DAMPAK NEGATIVE CAMPAIGN DAN PENOLAKAN UNI EROPA TERHADAP KOMODITAS CRUDE PALM OIL (CPO) DI INDONESIA.
- Hardy, J. (2015). ANALISIS DETERMINAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA KE UNI EROPA. *Jurnal ilmiah "INTEGRITAS"*, 100-101.
- Hikam, H. A. (2019, Maret 20). *Sawit RI Didiskriminasi, Luhut Ancam Boikot Produk Uni Eropa*. Diambil kembali dari Detik.com: <https://finance.detik.com/industri/d-4476221/sawit-ri-didiskriminasi-luhut-ancam-boikot-produk-uni-eropa>
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. (2019, April 5). *STATISTIK KELAPA SAWIT INDONESIA 2018*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Diambil kembali dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/jhonyudh/5ca72413a8bc156a755d5546/dampak-embargo-sawit-oleh-uni-eropa-bikin-indonesia-mandiri?page=all>
- Kartika, I. T. (2016). INTERAKSI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE DAN KEBIJAKAN INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA KE UNI EROPA. 5-7.
- KEMENHAN Indonesia. (2018, Oktober 15). *Menhan RI Ajak Mitra dari Eropa untuk Gabung dengan Our Eyes Initiative*. Diambil kembali dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: <https://www.kemhan.go.id/2018/10/15/menhan-ri-ajak-mitra-dari-eropa-untuk-gabung-dengan-our-eyes-initiative.html>
- KEMENHAN Indonesia. (2018, Januari 25). *Soft Launching "Our Eyes", Indonesia dan Lima Negara ASEAN Kerja sama Pertukaran Informasi Strategis*. Diambil kembali dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: <https://www.kemhan.go.id/2018/01/25/soft-launching-our-eyes-indonesia-dan-lima-negara-asean-kerja-sama-pertukaran-informasi-strategis.html>
- Kementerian Perdagangan*. (2019). Diambil kembali dari Portal Statistik Perdagangan, Neraca Perdagangan Indonesia dan Belanda Periode: 2016-2020: <https://statistik.kemendag.go.id/balance-of-trade-with-trade-partner-country>

- Kementerian Perdagangan. (2019). *Tingkatkan Ekspor Indonesia Melalui Penguatan Kebijakan Asal Barang, Kemendag Terbitkan Permendag Nomor 111 Tahun 2018*. Jakarta: Biro HUMAS KEMENDAG.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2019). *Tingkatkan Ekspor Indonesia Melalui Penguatan Kebijakan Asal Barang, Kemendag Terbitkan Permendag Nomor 111 Tahun 2018*. Jakarta: Biro HUMAS KEMENDAG.
- Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB). (2013). *PENSIJILAN MINYAK SAWIT MAMPAN MALAYSIA (MSPO)*. Diambil kembali dari Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB): <https://mspo.mpob.gov.my/>
- Malian, A. H. (2004). *KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL*. 149-150.
- Mangkuto, W. S. (2019, April 6). *Resmi, RI dan Malaysia Ajukan Protes Larangan CPO ke UE*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190408115325-4-65158/resmi-ri-dan-malaysia-ajukan-protos-larangan-cpo-ke-ue>
- Marica, I. (2021, April 7). *Romania remains the EU's largest sunflower producer*. Diambil kembali dari Romania Insider: <https://www.romania-insider.com/romania-sunflower-production-eu-2020>
- Merrysa, I. (2018). *UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS EKSPOR MINYAK SAWIT SETELAH ADANYA KEMPANYE NEGATIF*. 65.
- Our World in Data. (2020, December). *Palm Oil*. Diambil kembali dari Our World in Data: <https://ourworldindata.org/palm-oil>
- Portal Statistik Perdagangan. (2021). *Perkembangan Ekspor NonMigas (Sektor)*. Diambil kembali dari Portal Statistik Perdagangan: <https://statistik.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-export-sectoral>
- Portal Statistik Perdagangan. (2021). *Perkembangan Ekspor NonMigas (Komoditi)*. Diambil kembali dari Portal Statistik Perdagangan: <https://statistik.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-export-commodity>
- Prasetyo, W. B. (2018, April 26). *Pengusaha Desak Pembatasan Sawit di Eropa Diselesaikan G to G*. Diambil kembali dari Berita Satu.com: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/490055/pengusaha-desak-pembatasan-sawit-di-eropa-diselesaikan-g-to-g>
- Redaksi Majalah Sawit Indonesia. (2019, Mei 10). *Peta Sawit 2019 Berubah: Konsumsi Domestik CPO Melonjak*. Diambil kembali dari Majalah Sawit : <https://sawitindonesia.com/peta-sawit-2019-berubah-konsumsi-domestik-cpo-melonjak/>

- Samuel Pablo. (2019, Maret 21). *Penjelasan Lengkap UE terkait Aturan Biodiesel Berbasis CPO*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190321183400-17-62178/penjelasan-lengkap-ue-terkait-aturan-biodiesel-berbasis-cpo>
- Statista. (2021, Juli 16). *Leading importers of palm oil worldwide in 2019*. Diambil kembali dari Statista: <https://www.statista.com/statistics/1023677/palm-oil-importer-leading-global/>
- Suling, W. (2016, December 27). *Sertifikasi ISPO – Membantu Menjadikan Sektor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Lebih Berkelanjutan*. Diambil kembali dari Smart-tbk.com: <https://www.smart-tbk.com/ispo-certification-helping-indonesian-palm-oil-sector-become-sustainable/>
- Suseno Budidarsono, A. S. (2013). Oil Palm Plantations in Indonesia: The Implications for Migration, Settlement/Resettlement and Local Economic Development. *Oil palm plantation development in Indonesia: A brief review Biofuels - Economy, Environment and Sustainability*.
- Tempo.co. (2018, Agustus 23). *Kontribusi Sektor Sawit Bagi Perekonomian Nasional*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1119732/kontribusi-sektor-sawit-bagi-perekonomian-nasional/full&view=ok>
- The European Commission's science and knowledge service. (2019, Juli 23). *Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II)*. Diambil kembali dari EU Science Hub: <https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast-2030-red-ii>
- Walhi Desak Pemerintah Buat Road Map Kelapa Sawit untuk Biodiesel. (2018, Agustus 9). Diambil kembali dari Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/09/210600626/walhi-desak-pemerintah-buat-road-map-kelapa-sawit-untuk-biodiesel>
- Wulansari, I. (2017). Industrialisasi Minyak Sawit di Indonesia: Resistensi Warga Dusun Tanjung Pusaka, Kalimantan Tengah, Terhadap Industri Sawit. 12.